



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660)
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran dan cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang

Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pilihan, yaitu urusan Pertanian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

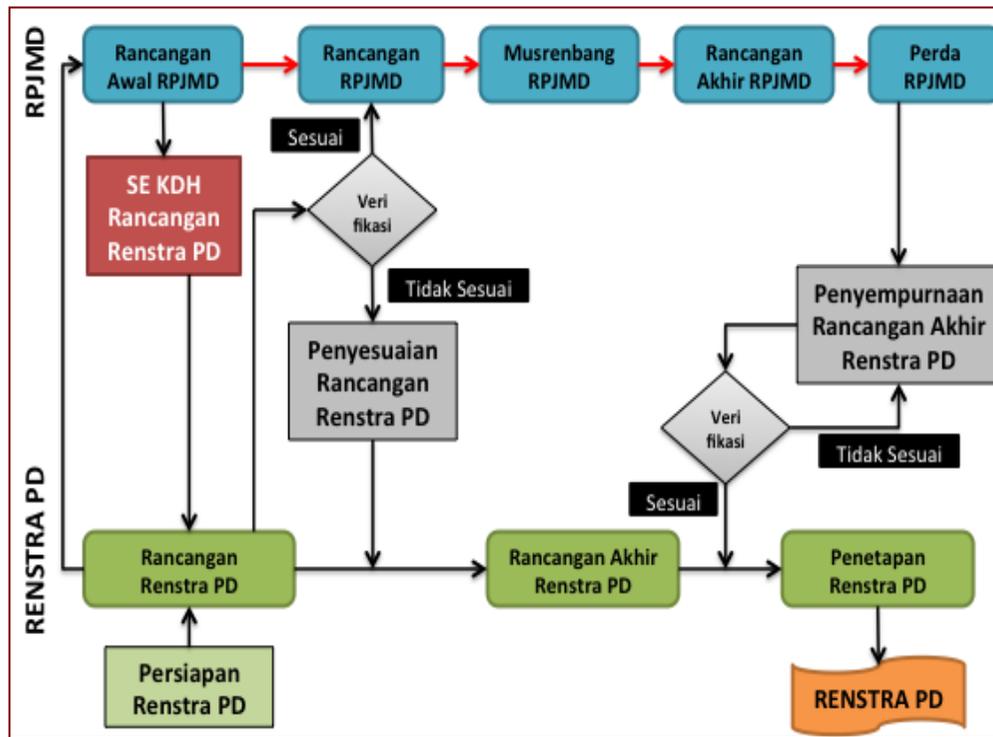
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Penetapan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660)
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 11. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
21. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 31);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.2. Sumber daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

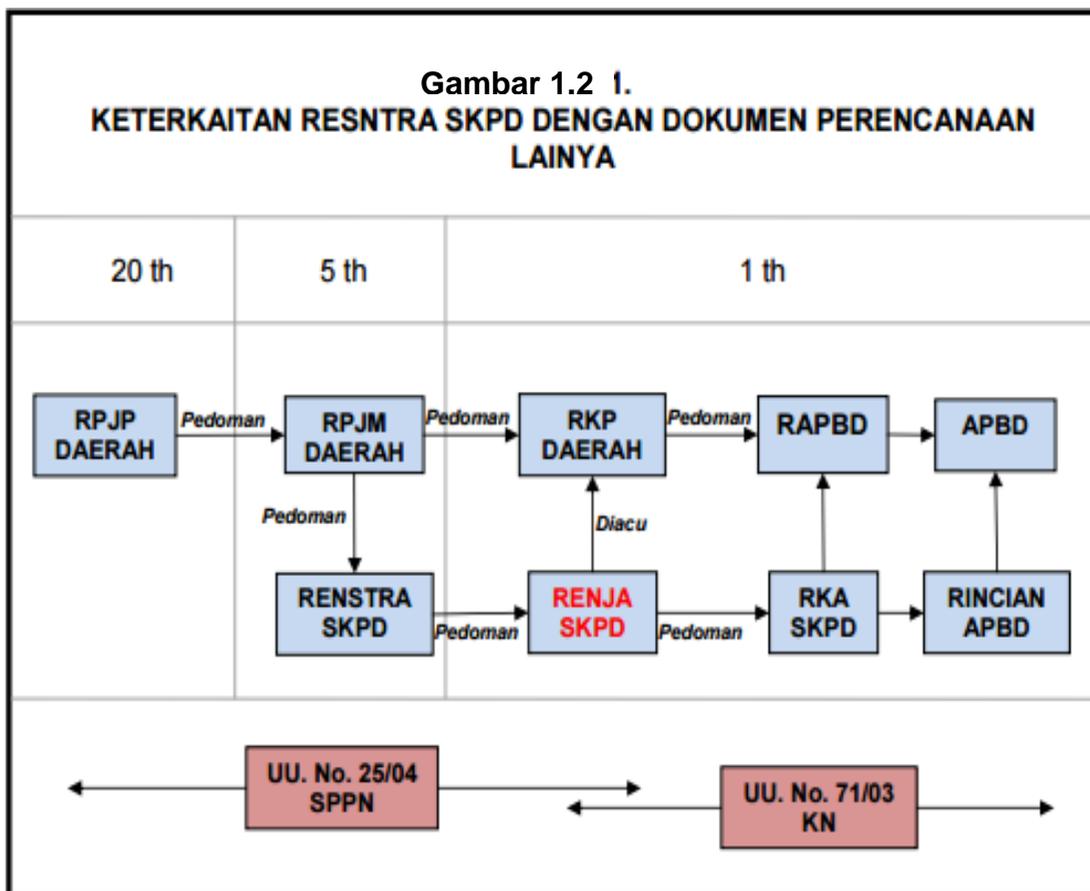
Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-

2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian dan bidang pangan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki fungsi menyelenggarakan:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, sumberdaya, ketahanan pangan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian dan pangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Khusus pembagian urusan pemerintahan daerah kabupaten pada bidang pertanian dan bidang pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

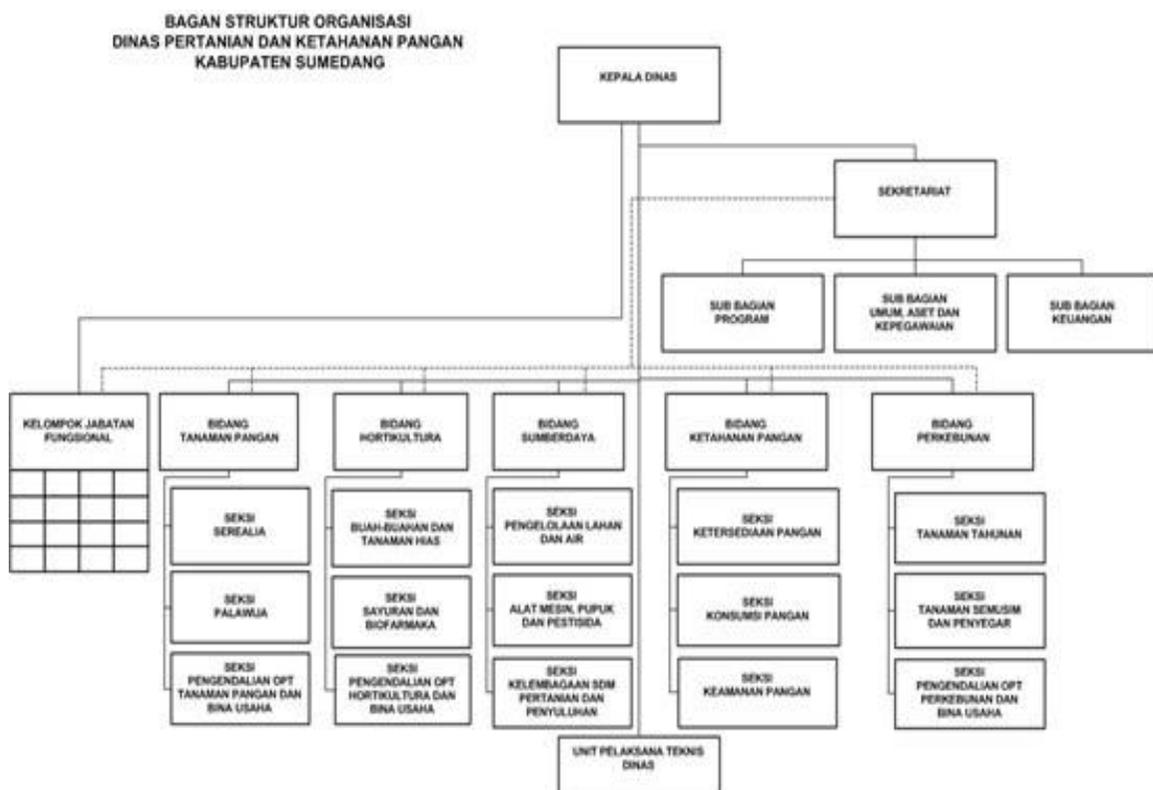
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - 1) Sub Urusan : Sarana Pertanian
 - Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
 - 2) Sub Urusan : Prasarana Pertanian
 - Pengembangan prasarana pertanian.
 - 3) Sub Urusan : Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
 - 4) Sub Urusan : Perijinan usaha pertanian.
 - Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
 - 1) Sub Urusan: Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian
 - Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
 - 2) Sub Urusan: Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
 - a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
 - c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 - d) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
 - 3) Sub Urusan: Penanganan Kerawanan Pangan
 - a) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
 - b) Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
 - c) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten.
 - 4) Sub Urusan: Keamanan Pangan
 - Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Tanaman Pangan;
- d. Kepala Bidang Hortikultura;
- e. Kepala Bidang Sumberdaya;
- f. Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Kepala Bidang Perkebunan;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional (Penyuluh Pertanian).

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan paling banyak berada di kelompok umur >50 yaitu sebanyak 89 orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 sebanyak 54 orang dan kelompok umur 41-45 sebanyak 38 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 21 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 26 orang kemudian kelompok umur 25-30 sebanyak 10 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 89 orang berusia di atas 50 tahun yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Kelompok Umur

No.	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	SEKRETARIAT	-	-	2	2	5	6	6	21
2	BIDANG TANAMAN PANGAN	-	-	1	3	3	4	2	13
3	BIDANG HORTIKULTURA	-	-	1	0	3	3	2	9
4	BIDANG PERKEBUNAN	-	-	0	0	1	3	5	9
5	BIDANG SUMBERDAYA	-	-	0	0	5	3	2	10
6	BIDANG KETAHANAN PANGAN	-	-	0	0	2	4	2	8
7	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	-	-	1	4	10	20	47	82
8	PENYULUH PERTANIAN	10	-	21	12	9	11	23	86
TOTAL		10	-	26	21	38	54	89	238

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 30 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 148 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 60 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I tidak ada.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Golongan

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKERTARIAT	-	5	13	3	21
2	BIDANG TANAM PANGAN	-	1	11	1	13
3	BIDANG HORTIKULTURA	-	4	4	1	9
4	BIDANG PERKEBUNAN	-	1	4	4	9
5	BIDANG SUMBERDAYA	-	2	7	1	10
6	BIDANG KETAHANAN PANGAN	-	1	4	3	8
7	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	-	11	69	2	82
8	PENYULUH PERTANIAN	-	35	36	15	86
TOTAL		0	60	148	30	238

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S2/S3 yaitu sebanyak 28 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 113 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 113orang, dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 82 orang. Dari jumlah pegawai golongan III, dan IV sebanyak 178 orang, tercatat hanya 141 orang yang tingkat pendidikannya S1 dan S2, berarti terdapat 37 orang pegawai golongan III dan IV yang tingkat pendidikannya belum menempuh S1/S2.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SMA/ SMK	D3	S1	S2/S3	
1	SEKRETARIAT	-	-	7	2	9	3	21
2	BIDANG TANAMAN PANGAN	-	-	0	2	9	2	13
3	BIDANG HORTIKULTURA	-	-	4	0	4	1	9
4	BIDANG PERKEBUNAN	-	-	1	0	4	4	9
5	BIDANG SUMBERDAYA	-	-	2	1	5	2	10
6	BIDANG KETAHANAN PANGAN	-	-	2	0	3	3	8
7	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	-	-	27	2	40	13	82
8	PENYULUH PERTANIAN	-	-	39	8	39	0	86
TOTAL		0	0	82	15	113	28	238

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 85 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 82 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 82 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya 86 adalah fungsional penyuluh pertanian. Data pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4a Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	75
4	Fungsional Tertentu/ Penyuluh Pertanian (Ahli dan Terampil)	86
5	Fungsional Umum	70
TOTAL		238

Tabel 2.4b Rincian Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ORANG
1	KEPALA DINAS	1
2	SEKRETARIS	1
3	KEPALA BIDANG	5
4	KEPALA SUB BAGIAN	3
5	KEPALA SEKSI	15
6	KEPALA UPTD :	30
7	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	30
8	JABATAN PELAKSANA	70
A.	SEKRETARIAT DINAS :	
1.	SUBAG PROGRAM	
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
	Analisis Data dan Informasi	
2.	SUBAG UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN	
a.	KEPEGAWAIAN :	
	Analisis SDM Aparatur	1
	Pengadministrasian Kepegawaian	1
b.	ASET :	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana	1
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
	Pengadministrasian Sarana Prasarana	1
c.	UMUM :	

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ORANG
	Pengadministrasi Umum	1
3.	SUBAG KEUANGAN	
	Bendahara	2
	Penata Keuangan	1
	Penata Laporan Keuangan	2
	Pengelola Keuangan	1
	Pengadministrasi Keuangan	1
	Pengadministrasi Anggaran	1
B.	BIDANG TANAMAN PANGAN :	
1.	SEKSI SERELIA	
	Penata Dokumen Hasil Produksi	1
	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	1
	Pengelola Budidaya Dan Pengembangan Tanaman Pangan	1
	Pengelola Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1
2.	SEKSI PALAWIJA	
	Analisis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	1
3.	SEKSI PENGENDALIAN OPT TANAMAN PANGAN DAN BINA USAHA	
	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	1
	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	1
C.	BIDANG HORTIKULTURA :	
1.	SEKSI BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN HIAS	
	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	1
2.	SEKSI SAYURAN DAN BIOFARMAKA	
	Penata Dokumen	1
	Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas Tanaman	1
	Pengadministrasi Umum	2
3.	SEKSI PENGENDALIAN OPT HORTIKULTURA DAN BINA USAHA	
	Analisis Informasi Hasil Pertanian	1
	Pengadministrasi Umum	1
D.	BIDANG PERKEBUNAN :	
1.	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
	Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan	1
2.	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
	Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan	1
3.	SEKSI PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN DAN BINA USAHA	
	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	1
	Pengadministrasi Umum	1
E.	BIDANG SUMBER DAYA :	
1.	SEKSI PENGOLAHAN LAHAN DAN AIR	
	Analisis Lahan Pertanian	1
	Penelaah Erosi dan Sedimentasi	1
2.	SEKSI ALAT MESIN, PUPUK DAN PESTISIDA	
	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1
	Pengadministrasi Umum	1

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ORANG
3.	SEKSI KELEMBAGAAN, SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN	
	Analisis Materi Penyuluhan	1
	Analisis Metode Penyuluhan	1
	Pengadministrasi Umum	1
F.	BIDANG KETAHANAN PANGAN	
1.	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	
	Pengawas Harga Pangan	1
2.	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
	Analisis Pangan	1
3.	SEKSI KEAMANAN PANGAN	
	Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik	1
	Pengadministrasi Umum	1
G.	UPTD	
1.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH JATINANGOR	
	Pengadministrasi Umum	1
2.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH CIMANGGUNG	
	Penata Dokumen Hasil Produksi	1
3.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH TANJUNGSARI	
	-	-
4.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH SUKASARI	
	Pengadministrasi Umum	1
5.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH PAMULIHAN	
	Pengadministrasi Umum	1
6.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH RANCAKALONG	
	-	-
7.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH SUMEDANG UTARA	
	-	-
8.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH SUMEDANG SELATAN	
	Pengadministrasi Umum	1
9.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH GANEAS	
	Pengelola Perencanaan Dan Pelaporan Usaha Tani	1
	Pengadministrasi Umum	1
10.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH CISITU	
	Penata Dokumen Hasil Produksi	1
11.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH SITURAJA	
	Penata Dokumen Hasil Produksi	1
12.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH DARMARAJA	

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ORANG
	Pengadministrasi Umum	1
13.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH CIBUGEL	
	Pengadministrasi Umum	1
14.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH WADO	
	Pengadministrasi Umum	2
15.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH JATINUNGGAL	
	Pengadministrasi Umum	1
16.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH JATIGEDE	
	Pengadministrasi Umum	1
17.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH TOMO	
	Pengadministrasi Umum	1
18.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH UJUNGJAYA	
	-	-
19.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH CONGGEANG	
	Penata Dokumen Hasil Produksi	1
20.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH BUAHDUA	
	-	-
21.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH TANJUNGKERTA	
	-	-
22.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH TANJUNGMEDAR	
	Pengadministrasi Umum	1
23.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH SURIAN	
	Pengadministrasi Umum	1
24.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH CIMALAKA	
	Pengadministrasi Umum	1
25.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH PASEH	
	Pengadministrasi Umum	2
26.	UPTD PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH CISARUA	
	-	-
27.	UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA UJUNGJAYA	
	-	-
28.	UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA DAN PEMBIBITAN PERKEBUNAN RANCAKALONG	
	-	-
29.	UPTD KAWASAN AGROTEKNOBISNIS SUMEDANG	
	-	-
30.	UPTD AGROBISNIS TEMBAKAU SUMEDANG	

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ORANG
	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	1
	Pengadministrasi Umum	1
9	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	86
	PENYULUH PERTANIAN :	
	Penyuluh Pertanian Ahli	-
	Penyuluh Pertanian Madya	15
	Penyuluh Pertanian Muda	19
	Penyuluh Pertanian Pertama	6
	Penyuluh Pertanian Terampil	-
	Penyuluh Pertanian Penyelia	2
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	9
	Penyuluh Pertanian Pelaksana	7
	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	28
	JUMLAH KESELURUHAN PNS	238

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 163 orang, sedangkan perempuan sebanyak 75 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	SEKRETARIAT	7	14	21
2	BIDANG TANAMAN PANGAN	2	11	13
3	BIDANG HORTIKULTURA	5	4	9
4	BIDANG PERKEBUNAN	1	8	9
5	BIDANG SUMBERDAYA	2	8	10
6	BIDANG KETAHANAN PANGAN	1	7	8
7	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	29	53	82
8	PENYULUH PERTANIAN	28	58	86
	TOTAL	75	163	238

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 69% persen laki-laki menduduki jabatan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	5	6
3	Eselon IV	22	53	75
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	28	58	86
5	Fungsional Umum	23	47	70
TOTAL		74	164	238

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dirasakan belum mencukupi dan belum memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan s/d TA. 2017

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	11 unit	10	1	
2.	Kendaraan roda 2	242 unit	232	10	
3.	Buku Perpustakaan	788 buku	18	-	
4.	Tanah	Luas 101.79,40m ²	-	-	
5.	Bangunan	Luas lantai 17.927 m ²	-	-	

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
6.	Peralatan kantor : - Komputer PC - Laptop - Printer - Kursi - Meja - Filing Cabinet	280 unit 87 unit 226 unit 1.040 unit 577 unit 106 unit			

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Periode 2014-2018

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan target sasaran Renstra periode 2014-2018 dapat dilihat pada Table 2.8 dan 2.9.

Tabel 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita				Persen	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50	88,5	90,03	90,03	90	100,00	98,88	100,03	99,48	98,90	109,29
2	Persentase Penguatan Cadangan Pangan				Persen	53,43	60,00	66,60	73,20	79,80	40,24	66,67	66,67	68,6	100,00	75,31	111,12	100,11	93,72	125,31
3	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah				Persen	75,00	90,00	95,00	100,00	100,00	45	85,53	85,53	95,4	100,00	60,00	95,03	90,03	95,40	100,00
4	Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan				Persen	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	75	89,06	89,06	93,5	100,00	88,24	98,96	93,75	93,50	100,00
5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				Persen	87,80	90,00	91,90	93,80	95,70	86,3	78,44	88,9	95,6	85,00	98,29	87,16	96,74	101,92	88,82
6	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan				Persen	73,13	80,00	86,90	93,80	100,00	59,3	20	27,9	92,5	100,00	81,09	25,00	32,11	98,61	100,00
7	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan				Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	50	85,71	85,71	65	100,00	90,91	142,85	131,86	92,86	133,33
8	Peningkatan produksi padi sebesar 2% per tahun				ton GKG	521.079	531.501	542.131	552.973	564.033	492.024	456.370	478.716	591.696	578.840	94,42	85,86	88,30	107,00	102,63
9	Peningkatan produksi palawija sebesar 2% per tahun				ton	248.909	253.887	258.964	264.144	269.427	244207	229140	235342	221187	272.660	98,11	90,25	90,88	83,74	101,20
10	Peningkatan produksi hortikultura unggulan dan prospektif daerah				ton	218.000	228.000	239.000	250.000	262.000	173829	111836	198376	253054	343.731	79,74	49,05	83,00	101,22	131,20
11	Bertambahnya jumlah kelompok tani yang menerapkan pengelolaan pasca panen dan perbaikan mutu pengelolaan hasil pertanian				Kelompok tani	5	5	5	5	5	8	11	59	27	33	160,00	220,00	1.180,00	540,00	660,00
12	Meningkatnya kemitraan usaha tani				Kelompok tani	13	14	15	16	17	15	16	16	18	22	115,38	114,29	106,67	112,50	129,41
13	Ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian :																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	- Alsintan				Unit	250	250	250	250	250	568	269	636	1711	268	227,20	107,60	254,40	684,40	107,20
	- Jaringan Irigasi Perdesaan				Ha	500	500	500	500	500	3137	4428	2291	1555	2.765	627,40	885,60	458,20	311,00	553,00
	- Jalan Usaha Tani				Km	10	10	10	10	10	16,47	16	9,75	7,99	3,50	164,70	160,00	97,50	79,90	35,00
14	Peningkatan lahan produktif perkebunan				Ha	73	73	73	73	73	98	146	285	437	1.084	134,25	200,00	390,41	598,63	1.484,93
15	Ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur perkebunan				Kel	21	23	21	21	21	16	36	41	17	16	76,19	156,52	195,24	80,95	76,19
16	Frekuensi fasilitasi kemitraan usaha agrobisnis komoditas perkebunan				Kel	1	1	1	1	1	1	2	10	1	22	100	200	1.000	100	2.200

Berdasarkan data pada Tabel 2.8 diketahui bahwa pencapaian dari target Renstra periode Tahun 2014-2018 dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam realisasinya selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuatif. Banyak faktor penyebabnya, baik faktor alam (ketersediaan air yang terpengaruh oleh curah/intensitas hujan, serangan hama dan penyakit, banjir, kekeringan, kelembaban, dll) maupun faktor lainnya (masih terjadinya alih fungsi lahan, kebijakan program/kegiatan, penerapan teknologi budidaya, penggunaan varietas unggul, pengendalian hama dan penyakit, dukungan alat dan mesin pertanian, dll). Berkurangnya luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi ke non pertanian. Alih fungsi lahan sawah disebabkan oleh kebutuhan masyarakat dan swasta serta pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi produksi padi mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun -4,21% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 519.529 ton dari target sebesar 542.343 ton. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 591.696 ton dari target 552.973 ton.
2. Pencapaian realisasi produksi palawija mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun -7,16% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 240.507 ton dari target sebesar 259.066 ton. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 272.660 ton dari target 269.427 ton.
3. Pencapaian realisasi produksi hortikultura mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun -9,71% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 216.165 ton dari target sebesar 239.400 ton. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 343.731 ton dari target 262.000 ton.
4. Pencapaian realisasi jumlah kelompok tani yang menerapkan pengelolaan pasca panen dan perbaikan mutu pengelolaan hasil pertanian mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 452% yaitu rata-rata realisasi selama 5

tahun sebesar 28 kelompok tani dari target sebesar 5 kelompok tani. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 59 kelompok tani dari target 5 kelompok tani.

5. Pencapaian realisasi kemitraan usaha tani mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 16% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 17 kelompok tani dari target sebesar 15 kelompok tani. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 22 kelompok tani dari target 17 kelompok tani.
6. Pencapaian realisasi ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian mengalami peningkatan.
 - a) Untuk rata-rata pencapaian realisasi alsintan terhadap target selama 5 tahun 176,16% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 690 unit dari target sebesar 250 unit. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 22 kelompok tani dari target 1.711 unit.
 - b) Untuk rata-rata pencapaian realisasi Jaringan Irigasi Perdesaan terhadap target selama 5 tahun 467,04% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 2.835 hektar dari target sebesar 500 hektar. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 4.428 hektar dari target 500 hektar.
 - c) Untuk rata-rata pencapaian realisasi Jalan Usaha Tani terhadap target selama 5 tahun 7,42% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 11 km dari target sebesar 10 km. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 16 km dari target 10 km.
7. Pencapaian realisasi lahan produktif perkebunan mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 461,64% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 410 hektar dari target sebesar 73 hektar. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 1.084 hektar dari target 73 hektar.
8. Pencapaian realisasi ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur perkebunan mengalami peningkatan dan penurunan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 17,76% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 25 kelompok tani dari target sebesar 21 kelompok tani. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 41 kelompok tani dari target 21 kelompok tani.

9. Pencapaian realisasi frekuensi fasilitasi kemitraan usaha agrobisnis komoditas perkebunan mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 620% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 7 kelompok tani dari target sebesar 1 kelompok tani. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 22 kelompok tani dari target 1 kelompok tani.
10. Pencapaian realisasi persentase ketersediaan energi dan protein per kapita mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 1,34% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 91,71% dari target sebesar 90,50%. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 100% dari target 91,50%.
11. Pencapaian realisasi persentase penguatan cadangan pangan mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 2,75% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 68,44% dari target sebesar 66,61%. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 100% dari target 79,80%.
12. Pencapaian realisasi persentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun -10,55% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 82,29% dari target sebesar 92%. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 100% dari target 100%.
13. Pencapaian realisasi persentase stabilitas harga dan pasokan pangan mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun -4,97% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 89,32% dari target sebesar 94%. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 100% dari target 100%.
14. Pencapaian realisasi persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami peningkatan dan penurunan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun -5,44% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 86,85% dari target sebesar 91,84%. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 95,6% dari target 93,80%.
15. Pencapaian realisasi persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun -30,92% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun

sebesar 59,94% dari target sebesar 86,77%. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 100% dari target 100%.

16. Pencapaian realisasi persentase penanganan daerah rawan pangan mengalami peningkatan. Rata-rata pencapaian realisasi terhadap target selama 5 tahun 18,90% yaitu rata-rata realisasi selama 5 tahun sebesar 77,28% dari target sebesar 65%. Pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 100% dari target 75%.

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

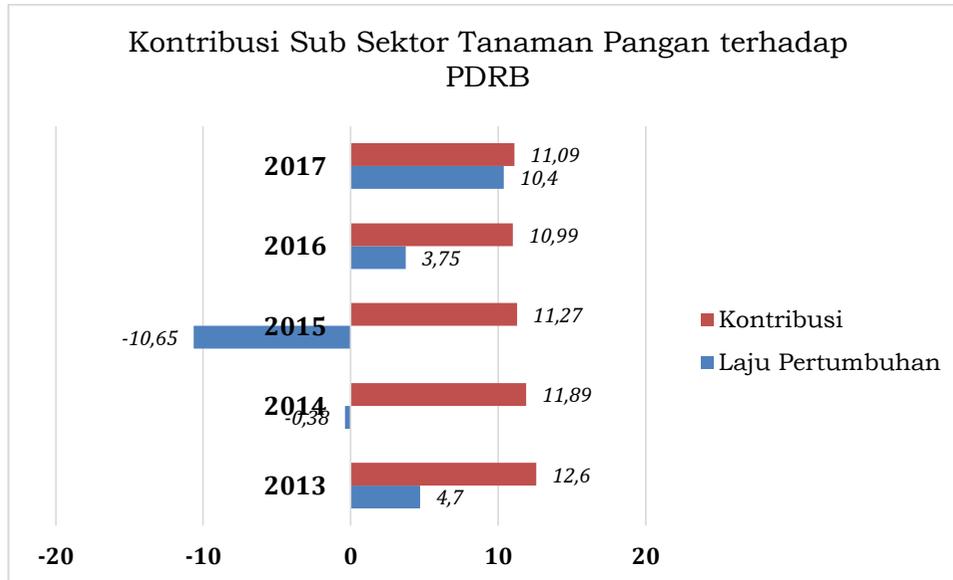
URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
PENDAPATAN DAERAH															
PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.000.000	179.804.400	219.220.800	165.000.000	115.000.000	125.000.000	169.534.350	177.612.800	91.590.000	115.000.000					
- Retribusi Daerah	125.000.000	179.804.400	219.220.800	150.000.000	100.000.000	125.000.000	169.534.350	177.612.800	76.590.000	100.000.000	100,00	94,29	81,02	51,06	100,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang tidak dipisahkan	-	-	-	15.000.000	15.000.000		-	-	15.000.000	15.000.000	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
BELANJA DAERAH															
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.937.776.287	19.046.862.747	22.848.246.065	17.331.174.010	23.791.872.095	6.904.144.396	18.893.957.687	22.743.780.615	17.319.554.390	20.195.258.352					
- Belanja Pegawai	6.937.776.287	19.046.862.747	22.848.246.065	17.331.174.010	23.791.872.095	6.904.144.396	18.893.957.687	22.743.780.615	17.319.554.390	20.195.258.352	99,52	99,20	99,54	99,93	84,88
BELANJA LANGSUNG	26.441.053.566	67.103.615.002	42.172.266.425	43.211.337.350	47.518.221.195	24.211.655.596	64.666.192.621	40.711.489.438	42.330.245.732	46.678.436.501					
- Belanja Pegawai	1.516.344.500	3.572.435.500	3.168.600.000	2.545.320.000	3.066.430.000	1.386.205.000	3.364.200.500	3.062.545.000	2.445.515.000	2.972.935.000	91,42	94,17	96,65	96,08	96,95
- Belanja Barang dan Jasa	22.733.319.576	61.683.221.131	35.944.190.725	38.912.771.850	41.863.134.750	20.780.530.296	59.502.255.071	35.098.437.838	38.311.738.732	41.210.925.654	91,41	96,46	97,65	98,46	98,44
- Belanja Modal	2.191.389.490	1.847.958.371	3.059.475.700	1.753.245.500	2.588.656.445	2.044.920.300	1.799.737.050	2.550.506.600	1.572.992.000	2.494.575.847	93,32	97,39	83,36	89,72	96,37

Berdasarkan data pada Tabel 2.9 diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya berkategori baik. Hal ini disebabkan karena lebih mantapnya program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang, disertai dengan penajaman prioritas dan fokus kegiatan program yang benar-benar dilandasi oleh analisis keadaan, analisis potensi sumberdaya yang akurat, sinergitas program antar dinas / instansi terkait pada setiap tingkatan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat lapangan, serta sejalan dengan tuntutan kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah/nasional.

Berdasarkan data tahun 2017 diketahui terdapat 121.138 penduduk Kabupaten Sumedang yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan, atau sekitar 9% dari total jumlah penduduk bekerja di sektor ini. Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Sumedang adalah beras, secara umum, tren produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan tahun 2013-2017 dan tidak mencapai target tahunannya di tahun 2013-2017. Namun produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya tersebut secara tren mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017.

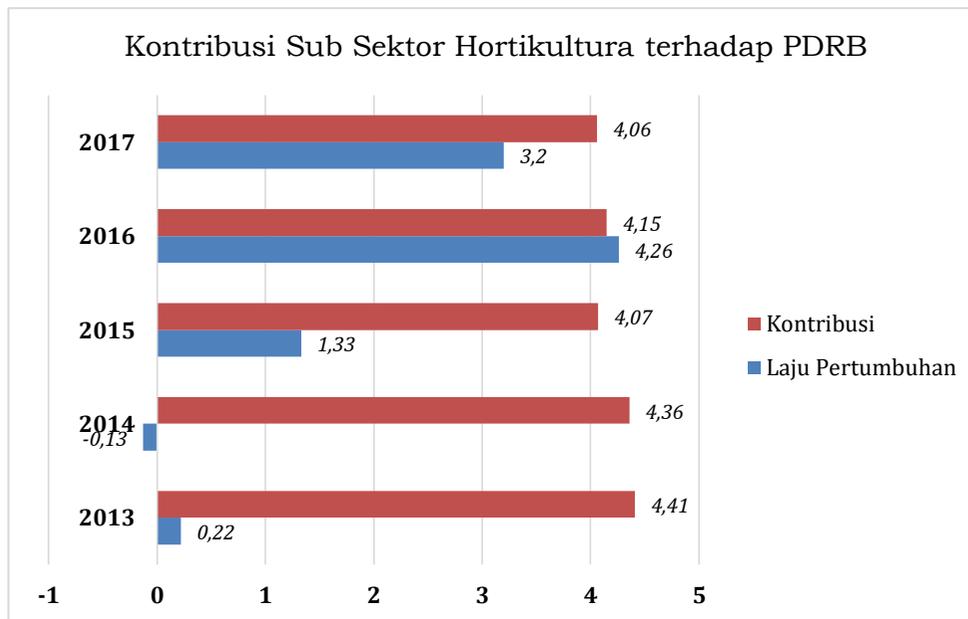
Sementara itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dibagi ke dalam 3 (tiga) sub sektor, yaitu sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Adapun rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB semakin mengalami penurunan, pada tahun 2013 tercatat 12,60%, kemudian menurun menjadi 11,09% pada tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri, disamping alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional dan perumahan/pemukiman. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di sub sektor tanaman pangan mengalami perlambatan hingga bernilai negatif pada tahun 2015 tercatat -10,65%, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan turunnya jumlah produksi tanaman pangan. Namun mulai tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan kembali mengalami percepatan hingga mencapai 10,4% pada tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada Gambar 2.2 di bawah ini.



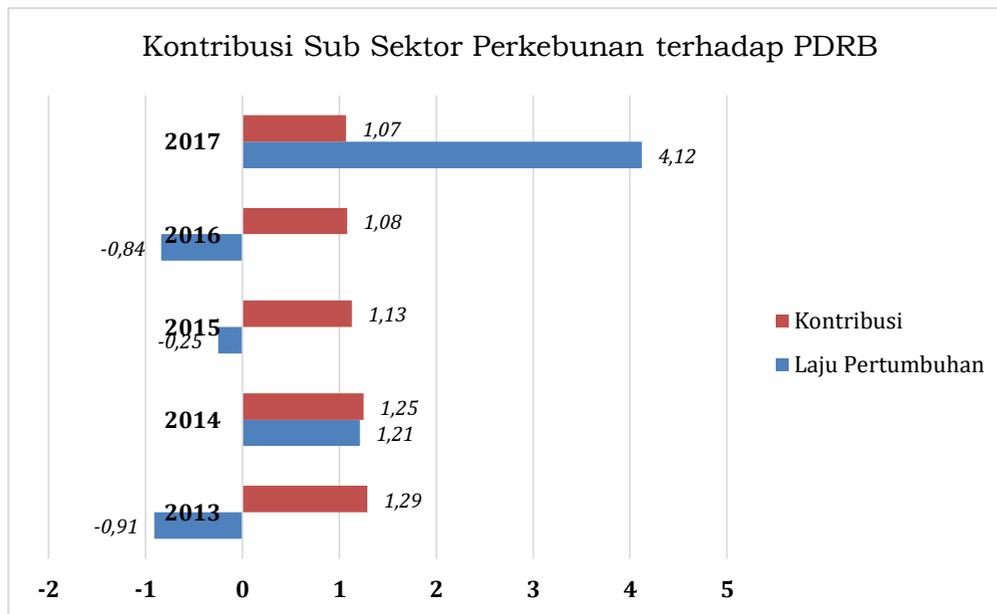
Gambar 2.2 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang

b. Kontribusi sub sektor hortikultura terhadap PDRB juga mengalami penurunan, pada tahun 2013 tercatat 4,41%, kemudian menurun menjadi 4,06% pada tahun 2017. Hal ini terjadi juga karena adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri, disamping alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional dan perumahan/pemukiman. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di sub sektor hortikultura mengalami perlambatan hingga bernilai negatif pada tahun 2014 tercatat -0,13%, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan turunnya jumlah produksi hortikultura. Namun mulai tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi sub sektor hortikultura kembali mengalami percepatan hingga mencapai 4,26% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan kembali tercatat 3,2% pada tahun 2017. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang

- c. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB relatif stabil, pada tahun 2013 tercatat 1,29%, kemudian menurun menjadi 1,07% pada tahun 2017. Hal ini terjadi juga karena adanya perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri, disamping alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional dan perumahan/pemukiman. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di sub sektor perkebunan mengalami perlambatan hingga bernilai negatif pada tahun 2013 tercatat -0,91%, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan turunnya jumlah produksi perkebunan. Namun mulai tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 1,21% dan mengalami penurunan hingga tahun 2016 kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 tercatat 4,12%. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam grafik 2.4 di bawah ini.



Gambar 2.4 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Perubahan Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan utama dalam pembangunan di pertanian. Pada tahun 2017 terjadi pengurangan luas lahan pertanian sebesar 0,004% dibandingkan satu tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.10. Diantara penyebab berkurangnya luas lahan pertanian adalah adanya pembangunan perumahan, perkantoran dan lain-lain.

Tabel 2.10. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2017

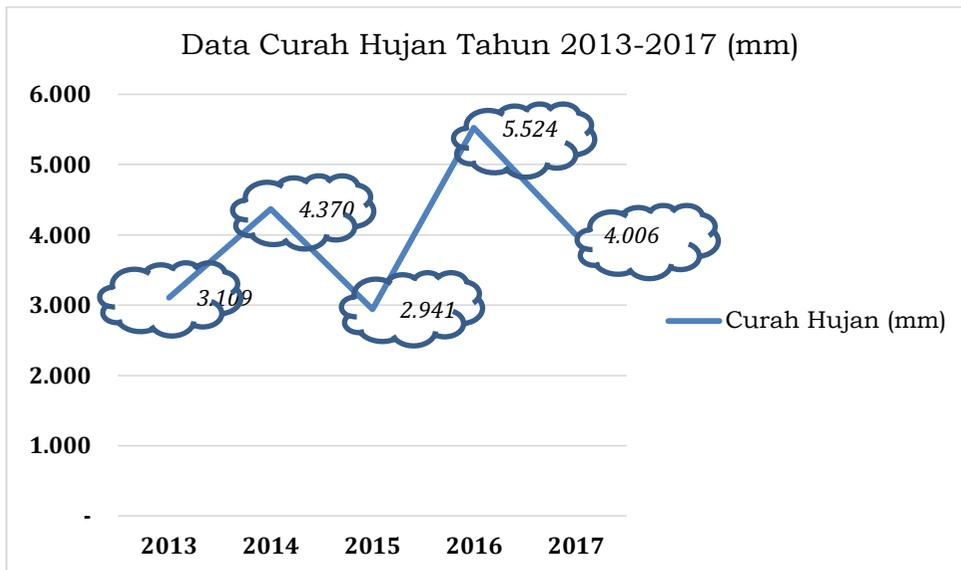
No.	Jenis Lahan	Luas (Ha)		Perkembangan (%)
		2016	2017	
I	Lahan Pertanian	125.143	125.138	-0,004
1	SAWAH	31.422	31.417	-0,016
	a. Irigasi	29.964	27.308	-8,864
	b. Tadah Hujan	4.458	4.109	-7,829
2	BUKAN SAWAH	93.721	93.721	0
	Tegal/Kebun	31.657	31.548	-0,344
	Ladang/Huma	6.000	6.109	1,817
	Perkebunan	4.169	4.169	0
	Ditanami pohon/ Hutan Rakyat	12.496	12.496	0
	Padang Penggembalaan/ Rumput	1.237	1.237	0
	Hutan Negara	26.470	26.861	1,477
	Sementara tidak diusahakan	5	0	-100
	Lainnya (tambak, dll)	11.687	11.301	-3,303
II	Lahan Bukan Pertanian	27.077	27.082	0,018
	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	27.077	27.082	0,018
	Jumlah Total	152.220	152.220	0

2. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan pembangunan yang terjadi secara global. Berdasarkan model perubahan iklim diprediksikan semua wilayah Indonesia akan mengalami kenaikan temperatur termasuk temperatur permukaan laut yang meningkatkan dan mengubah pola serta intensitas curah hujan yang akan meningkatkan risiko banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini memberikan dampak antara lain kekeringan berkepanjangan, banjir, bertambahnya frekuensi peristiwa iklim ekstrim yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta biodiversitas dan kestabilan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ancaman terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan sosial ekonomi nasional dan daerah

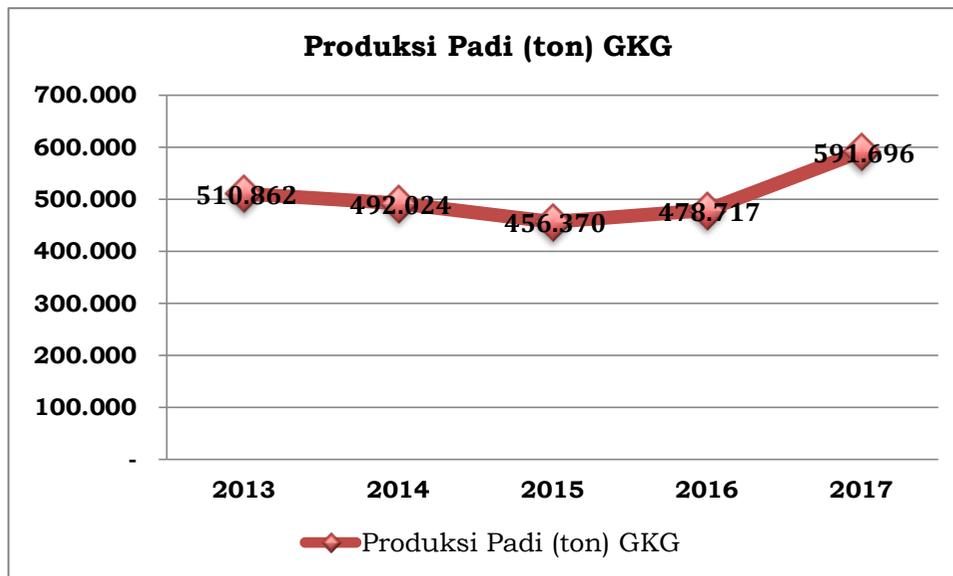
Fenomena perubahan iklim di Kabupaten Sumedang tampak pada anomali pola hujan di beberapa tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada gambar

3.5. Diantara dampaknya yang terjadi adalah bencana kekeringan, longsor dan banjir pada beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang.



Gambar 2.5. Fenomena Curah Hujan Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

Bencana yang disebabkan perubahan iklim ini menyebabkan kerugian bagi sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumedang yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian. Sebagai perbandingan dari grafik curah hujan diatas, pada Gambar 2.6 berikut disajikan grafik produksi padi di Kabupaten Sumedang pada periode yang sama. Pada grafik dapat dilihat bahwa kecenderungan hasil produksi padi berkorelasi dengan curah hujan, dimana pada curah hujan yang sangat rendah pada tahun 2015 menyebabkan turunnya produksi padi di tahun yang sama. Pada tahun 2107 terjadi peningkatan signifikan produksi padi karena ada program Upsus Pajale dari Kementerian Pertanian.



Gambar 2.6. Produksi Padi Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2017 (Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

3. *Fluktuasi harga komoditas pertanian*

Produk pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi harga, dimana saat panen raya menyebabkan menyebabkan harga merosot tajam, lain halnya pada masa paceklik, harga komoditas pertanian merangkak naik secara signifikan. Selain itu banyaknya rantai pemasaran juga menyebabkan fluktuasi harga. Hal ini menyulitkan petani untuk memperoleh kepastian harga dan kepastian pemasaran hasil, sehingga gairah petani untuk memproduksi cenderung rendah.

4. *Beberapa komoditi pertanian bersifat mudah rusak (perishable)*

Produk pertanian pada umumnya memiliki sifat rawan terhadap kerusakan (perishable), memiliki ukuran yang besar pertumpukan (*bulky/voluminous*), dan beraneka ragam mutunya (*quality variation*). Sifat produk pertanian yang mudah busuk dan rusak, terutama produk buah-buahan dan sayuran, memerlukan penanganan yang cepat dan cermat untuk menjaga mutu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.

Tabel 2.11 Suhu, Penyimpanan dan Daya Simpan Komoditas Pertanian

Komoditi	Suhu (°F)	Kelembaban (%)	Daya Simpan
Alpukat	37 - 48	85 - 90	1 - 2 minggu
Pisang mentah	53 - 60	85 - 90	1 - 3 minggu
Jambu biji mentah	7 - 10	90	4 minggu
Mangga	50	85 - 90	15 - 20 hari
Manggis	39 - 42	85 - 90	7 minggu
Jeruk manis		85 - 90	8 - 10 minggu
Pepaya	45	85 - 90	25 - 20 hari
Nenas	50 - 60	85 - 90	3 - 4 minggu
Sawo beludru	37 - 42	90	3 minggu
Srikaya	41	85 - 90	6 minggu
Durian	39 - 42	85 - 90	6 - 8 minggu
Jambu biji	47 - 50	85 - 90	2 - 5 minggu
Nangka	52 - 55	85 - 90	6 minggu
Langsat	52 - 58	85 - 90	2 minggu
Markisa	42 - 45	85 - 90	3 minggu
Kesemek	32 - 35	85 - 90	7 minggu
Rambutan	50	90 - 95	1 - 2 minggu

Sumber: Desrosier, Norman W., 1963, and ER.B., Pantastico, 1989

2.4.2. Peluang

1. Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi kedinasan, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen.
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Berisi ketentuan mengenai Sasaran Penyuluhan, Kebijakan dan Strategi, Kelembagaan, Tenaga Penyuluh, Penyelenggaraan, Sarana Prasarana, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan.
 - d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan

mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat.
- f. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Undang-undang ini memberikan jaminan Perlindungan Petani untuk segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

2. Koordinasi antar instansi yang baik

Saat ini koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan instansi lainnya yang berkaitan tergolong baik. Dengan koordinasi yang baik diharapkan penapaian target pembangunan khususnya di bidang pertanian akan lebih mudah dicapai.

Tabel 2.12 Koordinasi Antar Instansi

No	Instansi Terkait	Bentuk Koordinasi
1.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	
a.	Kementrian Pertanian	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dari APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK Fisik)
b.	Bappenas	Perencanaan APBN
c.	KemenpanRB	Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian (SAKIP)
d.	BULOG	Ketersediaan Pangan
e.	Kemenkumham	HAKI IG
f.	BKN	Kepegawaian
2	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi	
a.	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Perencanaan APBD Provinsi
b.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

	Jawa Barat	Kegiatan dari APBD Provinsi (Bantuan Keuangan, Tugas Pembantuan Provinsi/Dekonsentrasi/Bantuan Langsung
c.	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dari APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK Fisik)
d.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dari APBN (Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan DAK Fisik)
3	Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten	
a.	Bappppeda	Perencanaan APBD Kabupaten dan monitoring evaluasi kinerja RPJMD
b.	BPKA	Penganggaran dan Pembayaran
c.	Bapenda	Pendapatan Asli Daerah
c.	Sekretariat Daerah	Pengendalian realisasi program dan kegiatan, Pengadaan Barang Jasa, Pelaporan
c.	Inspektorat	Riviu Perencanaan, Penganggaran, Pembayaran dan Pelaporan; Pengawasan
d.	Instansi lainnya	Koordinasi yang berhubungan dengan program dan kegiatan terkait

3. Adanya inovasi spesifik lokasi pertanian yang dapat dikembangkan
- Tantangan dan dinamika pembangunan pertanian yang semakin berkembang menuntut terobosan inovasi teknologi dan kelembagaan yang tepat dan aplikatif bagi pengguna. Berbagai inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang dihasilkan diharapkan terus dikembangkan sehingga produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Tabel 2.13 Inovasi Spesifik Lokal di Kabupaten Sumedang

No	Inovasi Spesifik Lokasi	Lokasi
1	Teknologi budidaya kacang tanah	Situraja, Cistitu
2	Teknologi budidaya ubi cilembu (varietas rancung, varietas jawer)	Pamulihan, Sukasari, Tanjungsari, Rancakalong
3	Teknologi budidaya Sawo Sukatali	Situraja, Ganeas
4	Teknologi budidaya Mangga Gedong Gincu	Tomo, Ujungjaya, Jatigede, Jatinunggal
5	Teknologi budidaya Talas Semir	Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas

6	Teknologi budidaya Jeruk Cikoneng	Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Ganeas
7	Teknologi budidaya Salak Slebong	Paseh
8.	Teknologi budidaya Jali (varietas Watani Wado, varietas Watani Kiarapayung)	Wado, Sukasari
9.	Teknologi budidaya Pisang (varietas Roid Jatigede)	Jatigede

4. Teknologi yang mendukung produksi pertanian

Banyaknya teknologi pendukung peningkatan produksi pertanian (kualitas dan kuantitas) yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian untuk dimanfaatkan oleh para petani dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian.

Tabel 2.14 Teknologi Bidang Pertanian

No	Teknologi	Wilayah
I	Alat Mesin Pertanian	
	Traktor Roda 2 dan Roda 4	Kab Sumedang
	Cultivator	Kab Sumedang
	Hand sprayer	Kab Sumedang
	Mesin pompa air	Kab Sumedang
	Transplanter	Kab Sumedang
	Combine Harvester	Kab Sumedang
	Paddy Mower	Kab Sumedang
	Power Tresher	Kab Sumedang
	Cornsheller	Kab Sumedang
	Rice Mill Unit (RMU)	Kab Sumedang
II	Teknologi Informasi Bidang Pertanian	
	Teleconference Jaringan Komunikasi Pos Penyuluhan desa	30 Posluhdes tersebar di Kab Sumedang
	Kalender Angka Tanam (KATAM)	Aplikasi
	Jarkomluhdes.id	Aplikasi
	Simluhtan	Aplikasi
	Cyber Extension	Aplikasi
	Siponi	Aplikasi
	Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Website
	KONSTRATANI (Komando Strategi Pembangunan Pertanian)	Kab Sumedang

III	Teknologi Budidaya Pertanian	
	Pengendalian Hama Terpadu	Kab Sumedang
	Luas Tambah Tanam (LTT)	Kab Sumedang
	Good Agriculture Practice (GAP)	Kab Sumedang
	Good Handling Practice (GHP)	Kab Sumedang

5. *Potensi Pangan Lokal Sebagai Pangan Alternatif*

Untuk mencapai ketahanan pangan, maka sangat penting adanya diversifikasi yang sebaiknya memanfaatkan pangan lokal mengingat potensi pangan lokal di Kabupaten Sumedang sangat melimpah. Tersedianya potensi pangan lokal sebagai alternatif pengganti pangan pokok yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan mengatasi persoalan kerawanan pangan.

Tabel 2.15 Potensi Pangan Lokal di Kabupaten Sumedang

No	Potensi Pangan Lokal	Kecamatan
1	Hanjeli	Wado, Rancakalong
2	Jagung	Cibugel, Jatinunggal
3	Ubi kayu	Cibugel, Pamulihan, Tanjungmedar, Buahdua
4	Ubi jalar	Pamulihan, Rancakalong, Tanjungsari
5	Gadung	Tomo
6	Sorgum	Surian
7	Talas Semir	Ganeas

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan

6. *Adanya komoditas yang memiliki Indikasi Geografis (HAKI-IG).*

Adanya komoditas yang sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (HAKI-IG) seperti Ubi Jalar Cilembu, Tembakau Mole, Tembakau Hitam dan Sawo Sukatali dan Kopi *Java Preanger* sebagai komoditi unggulan Kabupaten Sumedang yang tidak bisa ditiru oleh daerah lain.

7. *Banyaknya tenaga muda yang berpotensi di bidang pertanian.*

Banyaknya tenaga muda berpotensi dan lebih terbuka terhadap perubahan teknologi yang dapat diarahkan untuk bergerak bidang pertanian baik hulu maupun di hilir.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani
2	Bidang Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani

3	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alih fungsi lahan 2. Rendahnya kepemilikan lahan petani 3. Hama Penyakit Tanaman (HPT) 4. Tata Niaga pangan terlalu panjang 5. Rendahnya SDM petani 6. Distribusi hasil perkebunan
4	Bidang Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana prasarana pertanian 2. Rendahnya minat pemuda/i untuk bertani
5	Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua komoditas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (kecuali padi dan jagung) 2. Pola konsumsi masyarakat belum memenuhi B2SA

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Kepala Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023” Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama: Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Misi Kedua: Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial

masyarakat dan pemerintahan;

3. Misi Ketiga: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Misi Keempat: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Misi Kelima: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengemban Misi Ketiga yakni “Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal”.

Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hambatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
3	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan luas baku lahan pertanian (banyak pergeseran fungsi lahan pertanian); 2. Masih kurangnya alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan sebagian besar kondisi geografis lahan pertanian di Kabupaten Sumedang (dataran tinggi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penerbitan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 2. Perlu penyediaan peralatan pertanian yang mendukung geografis wilayah; 3. Perlu penyediaan fasilitas prasarana dan

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hambatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
		<p>berbukti);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketersediaan sumber-sumber air pertanian dan prasarana sarana infrastruktur pertanian masih rendah; 4. Perlu adanya integrasi database dan kewenangan irigasi pengairan pertanian antara Dinas Pertanian (Jaringan Irigasi Tersier) dengan Dinas PUPR (Daerah Irigasi, bendungan, jaringan primer dan sekunder); 5. Belum tertatanya pengembangan kawasan komoditas unggulan; 6. Nilai tambah sektor pertanian komoditas strategis masih rendah; 7. Minat pemuda tani untuk bertani berkurang; 8. Belum optimalnya kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian; 9. Masih terbatasnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; 10. Masih adanya daerah rentan pangan (produksi padi tidak stabil, dampak relokasi Waduk Jatigede); 11. Diversifikasi konsumsi pangan masih rendah (ketergantungan terhadap konsumsi beras masih tinggi); 12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi dan keamanan pangan segar. 13. Masih lemahnya pengawasan terhadap keamanan pangan segar (penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian). 	<p>sarana sumber-sumber air dan jaringan irigasi pertanian serta jalan pertanian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan koordinasi pengairan pertanian antar sektor (leading sektor Bappeda); 5. Perlu penataan pengembangan kawasan komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan; 6. Perlu ditambah penanganan pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis (sinergi dengan Dinas Industri dan Perdagangan); 7. Penguatan pelaku usaha tani berbasis agrobisnis (pelatihan); 8. Penguatan kapasitas dan sarana pendukung penyuluh pertanian; 9. Perlu penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat; 10. Tersedianya regulasi dalam mendukung diversifikasi pola konsumsi masyarakat; 11. Pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan pengembangan pangan lokal dalam memproduksi komoditas non beras; 12. Penyuluhan masyarakat untuk keamanan pangan segar; 13. Penindakan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan capaian Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat yang terkait dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk Tahun 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Sasaran Renstra DPKP Kabupaten Sumedang	Indikator Sasaran Renstra DPKP Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga Terkait	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agribisnis	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian: a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Tanaman Perkebunan	<i>Renstra Kementerian Pertanian RI 2015-2019 :</i> 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 3. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 4. Peningkatan pendapatan keluarga petani 5. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.	A. <i>Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 2018-2023:</i> 1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura B. <i>Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2018-2023:</i> 1. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan 2. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Perkebunan
2. Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<i>Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementan 2015-2019:</i> 1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; 2. Stabilisasi harga pangan; 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan 5. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.	<i>Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 :</i> 1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pangan Dan Gizi 2. Meningkatkan Produksi Peternakan dan 3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan enam aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Tanaman Pangan;
- 2) Permasalahan dalam Holtikultura;
- 3) Permasalahan dalam Perkebunan;
- 4) Permasalahan dalam Sumber Daya Pertanian;
- 5) Permasalahan dalam Ketahanan Pangan;
- 6) Permasalahan dalam Sekretariat Dinas.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi, mutu dan produktifitas tanaman serelia dan palawija;2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam;3. Masih tingginya kehilangan hasil akibat penanganan panen, serangan Hama Penyakit Tanaman dan dampak pengaruh iklim;4. Belum optimalnya penangan pasca	1. Belum optimalnya produksi, produktivitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		<p>panen komoditas tanaman pangan;</p> <p>5. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.</p>	
2	Bidang Hortikultura	<p>1. Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul bermutu;</p> <p>2. Belum terjaminnya mutu produksi;</p> <p>3. Belum optimalnya produktivitas komoditas hortikultura;</p> <p>4. Masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan hama dan dampak pengaruh iklim serta penanganan pasca panen;</p> <p>5. Belum optimalnya penyebaran informasi produk unggulan daerah.</p>	
3	Bidang Perkebunan	<p>1. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan;</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan perkebunan;</p> <p>3. Belum optimalnya produktivitas komoditas perkebunan;</p> <p>4. Masih tingginya gangguan hama penyakit komoditas perkebunan;</p> <p>5. Masih rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam penanganan budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;</p> <p>6. Belum memadainya sarana dan prasarana budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.</p>	
4	Bidang Sumber Daya	<p>1. Belum terpenuhinya secara optimal sarana prasarana infrastruktur pertanian baik kuantitas maupun kualitas;</p> <p>2. Belum ada regulasi tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, banyaknya pengembangan wilayah perumahan,</p> <p>3. Belum terpenuhinya secara optimal alat mesin pertanian baik kuantitas maupun kualitas untuk percepatan tanam, penanggulangan kekurangan tenaga kerja serta pengamanan produksi;</p> <p>4. Belum optimalnya kapasitas kerja alat mesin pertanian;</p> <p>5. Tingginya resiko usahatani yang mengakibatkan kegagalan panen;</p> <p>6. Penyaluran pupuk bersubsidi masih belum memenuhi kaidah ENAM TEPAT (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat</p>	

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		<p>tempat).</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Masih rendahnya kualitas SDM petani; 8. Masih rendahnya minat dan kesadaran petani untuk berkelompok; 9. Masih rendahnya insentif dan disinsentif buruh tani, baik berupa fasilitasi sarana produksi, keterampilan sehingga kesejahteraan buruh tani masih rendah; 10. Masih rendahnya dinamika kelembagaan tani; 11. Belum dinamisnya kelembagaan penyuluhan petani; 12. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja penyuluhan; 13. Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian; dan 14. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh. 	
5	Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; 2. Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah; 3. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah; 4. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 5. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan pokok; 6. Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan. 7. Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan; dan 8. Intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi; 9. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras; 10. Masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan masyarakat; 11. Belum optimalnya kesadaran konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting); 12. Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi perkapita perhari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang; 13. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal karena kurun waktu 2014-2018, fokus pemanfaatan lahan untuk komoditas pajale; 14. Belum optimalnya pemanfaatan 	2. Belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi penganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan.

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		<p>pekarangan dimasyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga;</p> <p>15. Beredarnya pangan segar asal tumbuhan terpapar bahan racun cemaran seperti pestisida, formalin dan bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh manusia;</p> <p>16. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan produk pangan;</p>	
6	Sekretariat Dinas	<p>1. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi organisasi;</p> <p>2. Kurangnya jumlah SDM aparatur;</p> <p>3. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur;</p> <p>4. Belum optimalnya prosedur kerja yang sesuai dengan standar pelayanan yang baik;</p> <p>5. Belum optimalnya sarana teknologi dan informasi; dan</p> <p>6. Belum adanya database yang valid untuk perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang.</p>	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Isu belum optimalnya produksi, produktivitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.

Berdasarkan data BPS, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada sektor pertanian (khusus sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan) mengalami kenaikan, dari 2.824.204,5 juta

rupiah pada tahun 2016 menjadi 3.039.118,6 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan pada tahun 2017 sektor pertanian di Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,61%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya berarti lajunya mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sektor pertanian, tanpa dipengaruhi inflasi.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) struktur ekonomi Kabupaten Sumedang masih didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; dan konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 20,33%. Nilai tersebut didominasi oleh peranan lapangan usaha pertanian dari sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar 16,22% dan sisanya dari sub sektor peternakan, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Sumedang masih tergantung terhadap kemampuan produksi dan nilai tambah sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) sangat dinamis tetapi cenderung meningkat terutama tahun 2017 pada sektor pertanian 6,99% terutama sub sektor tanaman pangan 10,04%, tanaman hortikultura 3,2% dan perkebunan 4,12%.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa sektor pertanian masih sangat potensial dikembangkan sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdapat peluang untuk mengembangkan sektor pertanian karena permintaan hasil pertanian dari pasar lokal dan regional cukup besar.

Adapun hambatan dalam hal ini produksi, produktivitas dan mutu hasil dan nilai tambah hasil pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan muncul dari : ketersediaan sumber-sumber air dan sarana infrastruktur pertanian; tingkat kesuburan lahan; terbatasnya kepemilikan lahan; alat mesin pertanian pra panen, panen dan pasca panen; penyediaan benih unggul; pelayanan saprodi; tingkat kehilangan hasil yang masih tinggi akibat serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim; penerapan teknologi produksi yang relatif rendah; standar teknis proses penanganan panen dan pasca panen; keterbatasan modal dan keterampilan tenaga kerja petani; fluktuasi harga; jaminan asuransi usaha tani sistem tata niaga hasil pertanian yang relatif panjang; terbatasnya penyebaran informasi dan fasilitasi promosi usaha tani; kapasitas dan sarana pendukung penyuluhan pertanian belum efektif dan produktif; dan pendapatan buruh tani masih rendah sebagai salah satu kantong kemiskinan di sektor pertanian.

Sedangkan ancaman adalah berupa masuknya produk pertanian dari luar Sumedang dan luar negeri. Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian adalah mendorong agribisnis komoditas unggulan dengan meningkatkan skala produksi secara intensifikasi dan efisiensi alokasi input, pembentukan kelompok-kelompok usaha, meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk dan penetrasi pasar, kerjasama dengan lembaga keuangan, investor, dan sumber pembiayaan lainnya guna menunjang modal, menerapkan dan mengembangkan teknologi serta kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian. Dalam perspektif kedepan, strategi yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang.

2. Isu belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi penganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan sehingga mempengaruhi pemantapan ketahanan pangan daerah.

Peluang pelayanan di bidang ketahanan pangan adalah Kabupaten Sumedang salah satu pemasok pangan utama di Jawa Barat, konsumen pangan paling tinggi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, daya saing daerah yang mampu menarik investasi, daya tarik pariwisata agribisnis di Kabupaten Sumedang, dan potensi pengembangan wilayah agribisnis.

Adapun tantangannya adalah masih terfokus pada peningkatan produksi pangan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*); tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi umbi-umbian, sayur, buah dan pangan hewani; masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal; terdapat beberapa wilayah memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang tinggi dan penetapan standar pangan yang semakin ketat.

Adapun hambatannya adalah adanya keterbatasan dalam penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah. Kenaikan konsumsi beras terjadi karena meningkatnya laju produksi padi di Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) dan semua pemanfaatan lahan pada prioritas komoditi pajale, sehingga produksi komoditi kelompok pangan lainnya belum begitu optimal, hal ini diprediksi berpengaruh terhadap konsumsi karbohidrat (beras), sehingga tidak tersedianya lahan untuk penanaman tanaman diluar padi, karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk program pemerintah Pajale (Padi, Jagung, Kedelai). Sedangkan lahan pekarangan belum dimanfaatkan dengan optimal. Tidak seluruh kecamatan mengajukan desa yang termasuk kategori miskin tinggi (rawan pangan) untuk mendapatkan intervensi/penanganan rawan pangan. Alokasi intervensi/penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.

Sedangkan ancamannya adalah situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri termasuk Kabupaten Sumedang, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan.

Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor ketahanan pangan adalah mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 jumlah penduduk Sumedang 1.146.435 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 0,38 persen dan hal ini akan mendorong permintaan kebutuhan pangan per kapita terus meningkat didukung pergeseran meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pada sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan masih merupakan kendala. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja, sehingga harus ada upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Di antaranya melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita.

Perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi efektivitas manajemen pembangunan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Di sisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan

ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil.

Untuk konsumsi pangan, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi, kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Penduduk ini juga merupakan agen pelaku usaha di bidang pangan yang menggerakkan perkonomian daerah maupun nasional. Kegiatan ekonomi pangan masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan rekayasa teknologi informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi sangat menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang di susun di antaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkatur Perangkat Daerah dan Provinsi Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, pelayanan ketahanan pangan akan fokus pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Terfokus pada peningkatan produksi dengan mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*);
2. Menekan tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dengan meningkatkan konsumsi umbi-umbian, sayur, buah dan pangan hewani;
3. Meningkatkan konsumsi penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal;
4. Ketersediaan pangan dalam mengantisipasi rawan bencana alam;
5. Sektor pangan menjadikan usaha untuk penurunan kemiskinan dikantung-kantung daerah miskin yang rawan pangan (angka kemiskinan 9,76%, BPS bulan September 2018);
6. Penanganan daerah rawan pangan terutama daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (*stunting*). Rawan pangan melibatkan banyak aspek seperti :

akses listrik, air bersih, pendidikan (SD), pangan (*Stunting*), akses jalan, roda 4, buta huruf serta kematian ibu melahirkan dan anak lahir.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ditempuh menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Sumedang, kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi, nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terkait dengan Misi Ketiga RPJMD, yaitu Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal. Pada Misi Ketiga terdapat Tujuan yang terkait, yaitu Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata. Tujuan RPJMD tersebut didukung dengan Sasarannya adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis dan Menjamin Ketahanan Pangan Daerah.

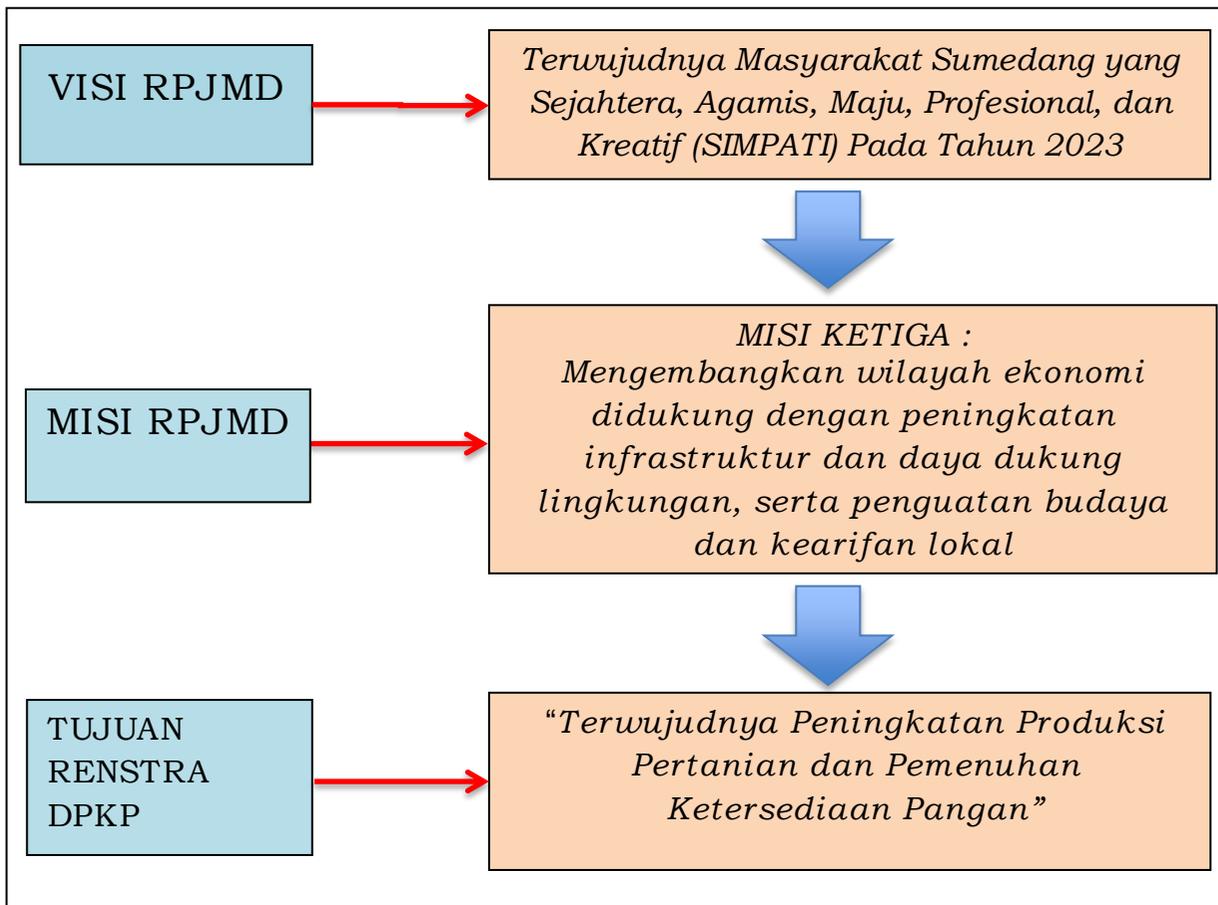
Untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka di dukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan tujuan periode 2018-2023 adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan”

Peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan sebagai salah bentuk untuk mewujudkan percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Sumedang. Ketahanan pangan didukung oleh beberapa sub sektor pertanian antara lain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ketersediaan pangan diawali dengan

hasil produksi pertanian yang melimpah dan mencukupi baik kualitas maupun kuantitas. Pergerakan perkembangan produksi pertanian akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Gambar 4.1 Keterkaitan Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Visi Misi RPJMD

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah pertanian dan ketahanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan sekaligus upaya mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang telah menetapkan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Daerah;
2. Menjamin Ketahanan Pangan Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018-2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						2019	2020	2021	2022	2023		
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian			persen	6,79	6,90	7,02	7,15	7,29	7,44	7,44	
		1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor :									
			a. Tanaman Pangan	Persen	10.04	10.14	0.24	10.34	10.45	10.55	10.55	
			b. Tanaman Hortikultura	Persen	3.20	4.00	4.70	5.40	6.10	6.80	6.80	
			c. Perkebunan	Persen	4.12	4.20	4.80	5.50	6.20	6.90	6.90	
2. Menjamin ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	85	87.30	88.50	89.60	90.80	92.50	92.50			

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

INTERNAL	EKSTERNAL
<p><i>Strength</i> (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang kuat untuk mengelola dan melaksanakan urusan ketahanan pangan dan pertanian; 2. Komitmen kepemimpinan yang baik untuk pencapaian keberhasilan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan; 3. Koordinasi dan kerjasama yang baik mulai antar bidang, antar seksi serta dengan sub unit kerja di UPTD; 4. Memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan memberikan pelayanan, pengaturan, pemberdayaan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sumberdaya dan ketahanan pangan; 	<p><i>Opportunity</i> (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas pokok dan fungsi kedinasan; 2. Tersedianya berbagai sumber sarana produksi dan alat mesin yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhkannya petani dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kegiatan usahatani; 3. Tersedianya berbagai sumber air potensial untuk pengairan dan masih tersedia lahan yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan efisiensi usahatani; 4. Peningkatan nilai tambah dari

INTERNAL	EKSTERNAL
<p>5. Tersedianya sub unit kerja UPTD di setiap kecamatan dan Penyuluh Pertanian di Desa Binaan yang dapat memudahkan pemberian pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan kepada petani;</p> <p>6. Dikuasainya berbagai teknologi untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahatani;</p>	<p>penanganan pasca panen komoditas memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani;</p> <p>5. Kemampuan petani masih dapat ditingkatkan dan memiliki respon yang tinggi terhadap upaya perbaikan dan peningkatan kegiatan usahatani ;</p> <p>6. Adanya komoditas unggulan daerah dan komoditas yang memiliki Indikasi Geografis (IG) untuk peningkatan pendapatan petani;</p> <p>7. Tersedianya program AUP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) untuk kesinambungan melaksanakan usahatani;</p> <p>8. Adanya kebijakan pengentasan kemiskinan dan program unggulan pemberdayaan buruh tani dari Bupati terpilih dalam pengentasan kemiskinan di sektor pertanian;</p> <p>9. Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan cadangan beras daerah dan tersedianya kelembagaan lumbung pangan masyarakat;</p> <p>10. Tersedianya potensi lahan pekarangan dan keragaman bahan pangan lokal sebagai sumber upaya penganeekaragaman konsumsi pangan.</p>
<p><i>Weakness (Kelemahan)</i></p> <p>1. Kompetensi pegawai belum optimal dapat mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan pemecahan permasalahan usaha tani;</p> <p>2. Jumlah sumberdaya pegawai di setiap sub unit kerja belum memenuhi kebutuhan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan yang optimal;</p> <p>3. Sarana dan prasarana penunjang yang ada, kualitas dan kuantitasnya belum memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal;</p> <p>4. Nomenklatur SKPD belum</p>	<p><i>Treath (Tantangan/Ancaman)</i></p> <p>1. Meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan yang jumlahnya cukup dan berkualitas serta aman sejalan peningkatan jumlah penduduk;</p> <p>2. Sebagian besar petani belum menggunakan benih/bibit unggul berkualitas dan sarana produksi anjuran lainnya dan belum optimalnya mendapatkan dukungan infrastruktur dan alat mesin pengairan dalam rangka peningkatan produksi, mutu dan produktifitas serta efisiensi usahatani;</p>

INTERNAL	EKSTERNAL
<p>sesuai dengan nomenklatur di Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian;</p> <p>5. SOP teknis dan administrasi belum optimal dilaksanakan dan dilakukan revisi perbaikan;</p> <p>6. Penempatan pegawai dengan jabatan pengelola belum optimal ditempatkan sesuai dengan basis pendidikan dan kompetensinya;</p> <p>7. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum optimal dilaksanakan.</p>	<p>3. Pengaruh dampak perubahan iklim, pengendalian hama penyakit dan penanganan panen yang menurunkan hasil belum dapat diantisipasi dan ditanggulangi secara optimal.</p> <p>4. Standar Teknis <i>on farm</i> dan <i>of farm</i> belum optimal dilaksanakan petani;</p> <p>5. Penyelenggaraan penyuluh pertanian belum optimal efektif dan produktif dalam meningkatkan kemampuan petani, kualitas kelembagaan petani dan penyebaran serta adopsi teknologi;</p> <p>6. Masih adanya potensi terjadinya rawan pangan masyarakat yang penanganannya perlu segera diantisipasi.</p> <p>7. Petani dengan status buruh belum fokus mendapatkan penanganan untuk meningkatkan pendapatannya;</p> <p>8. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);</p> <p>9. Adanya persaingan mutu dan harga pasar antara produk lokal dengan produksi impor;</p> <p>10. Penurunan tenaga kerja di sektor pertanian yang beralih ke sektor lain dan rendahnya minat generasi muda dalam usaha tani;</p> <p>11. Rata-rata kepemilikan lahan petani sempit dan tingginya alih fungsi lahan yang sulit dikendalikan.</p>

5.1.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan *Good Agriculture Practices* (GAP);

3. Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;
4. Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;
5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;
6. Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);
8. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
9. Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.
10. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;
11. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;
12. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
13. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;
14. Daerah rawan pangan (*stunting*) yang diintervensi;
15. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

5.1.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah:

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;

7. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
8. Akses permodalan dari lembaga keuangan;
9. Meningkatkan ketersediaan pupuk;
10. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen dan pasca panen;
11. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
12. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
15. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
16. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian.
17. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
18. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
19. Penganekaragaman konsumsi pangan;
20. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas;
21. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;
22. Kelembagaan dewan keamanan pangan;
23. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
24. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
25. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna;
26. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
27. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.

Selanjutnya struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023			
MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	1.3 Meningkatkan produksi komoditas unggulan daerah	Peningkatkan pendapatan petani dan buruh tani	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis.
	1.4 Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.

TABEL 5.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG 2018-2023

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023			
MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan	1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian unggulan daerah	1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		2. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan <i>good agriculture practices</i> (GAP);	2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		3. Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan	3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
			4. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
			5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		teknologi baru;	
		4. Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;	6. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
		5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;	7. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 8. Akses permodalan dari lembaga keuangan; 9. Meningkatkan ketersediaan pupuk; 10. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) pra panen dan pasca panen; 11. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
		6. Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	12. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 14. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		7. Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);	15. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		8. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh	16. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;	penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian
		9. Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.	17. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
		10. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;	18. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
	2. Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	11. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;	19. Penganekaragaman konsumsi pangan; 20. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas; 21. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
		12. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;	22. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;
		13. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;	23. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 24. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna; 25. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
		14. Daerah rawan pangan (<i>stunting</i>) yang diintervensi;	26. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.
		15. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.	27. Kelembagaan dewan ketahanan pangan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2018-2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian	6,79 Persen	6,90 Persen		7,02 Persen		7,15 Persen		7,29 Persen		7,44 Persen		7,44 Persen		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumedang	
	1. Meningkatkan produksi komoditas pertanian unggulan daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian :														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumedang	
				a. Tanaman Pangan	10,04 Persen	10,14 Persen		10,24 Persen		10,34 Persen		10,45 Persen		10,55 Persen		10,55 Persen				
				b. Tanaman Hortikultura	3,2 Persen	4,00 Persen		4,70 Persen		5,40 Persen		6,10 Persen		6,80 Persen		6,80 Persen				
				c. Perkebunan	4,12 Persen	4,20 Persen		4,80 Persen		5,50 Persen		6,20 Persen		6,90 Persen		6,90 Persen				
	2. Menjamin ketahanan pangan daerah			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85 Persen	87,30 Persen		88,50 Persen		89,60 Persen		90,80 Persen		92,50 Persen		92,50 Persen				
			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				56.693.234.500		36.010.579.500		37.869.098.150		39.807.076.850		39.930.397.200		210.310.386.200	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumedang	
			Program Kegiatan di Setiap SKPD				3.041.968.500		4.781.198.000		4.992.679.000		5.208.575.000		3.532.016.900		21.556.437.400	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.113.225.000		1.136.510.000		1.200.845.000		1.269.490.000		1.342.715.000		6.062.785.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumedang	
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon, Internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	148.680.000	12 bulan	158.790.000	12 bulan	169.600.000	12 bulan	181.120.000	12 bulan	193.425.000	12 bulan	851.615.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi kantor	32 jenis	32 jenis	296.500.000	32 jenis	316.670.000	32 jenis	338.195.000	32 jenis	361.200.000	32 jenis	385.750.000	32 jenis	1.698.315.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	19 media	19 media	28.920.000	19 media	30.890.000	19 media	33.000.000	19 media	35.250.000	19 media	37.650.000	19 media	165.710.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	76 OK	56 OK	130.000.000	60 OK	138.840.000	60 OK	148.300.000	60 OK	158.400.000	60 OK	169.175.000	296 OK	744.715.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	5 jenis	5 jenis	50.000.000	5 jenis	52.655.000	5 jenis	55.450.000	5 jenis	58.350.000	5 jenis	61.375.000	5 jenis	277.830.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan Kantor Dinas	12 orang	12 orang	144.000.000	12 orang	144.000.000	12 orang	144.000.000	12 orang	144.000.000	12 orang	144.000.000	12 orang	720.000.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.010.	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD	Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD	2 jenis	3 jenis	214.625.000	3 jenis	229.225.000	3 jenis	244.800.000	3 jenis	261.450.000	3 jenis	279.240.000	3 jenis	1.229.340.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Tenaga operasional kebersihan kantor dinas	5 orang	2 orang	28.500.000	2 orang	30.440.000	2 orang	32.500.000	2 orang	34.720.000	2 orang	37.100.000	2 orang	163.260.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah website dinas yang dikelola	0 website	1 website	62.000.000	1 website	25.000.000	1 website	162.000.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.00.00.01.024.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen SOP	0 SOP	80 SOP	10.000.000	80 SOP	10.000.000	80 SOP	10.000.000	80 SOP	10.000.000	80 SOP	10.000.000	80 SOP	50.000.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.262.065.500		2.894.013.000		2.332.059.000		2.970.860.000		1.162.556.000		10.621.553.500		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dinas/UPTD yang dibangun	0 unit	1 unit	120.000.000	1 unit	130.000.000	1 unit	145.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	160.000.000	5 unit	705.000.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	13 unit	0 unit	-	45 unit	1.541.000.000	26 unit	880.900.000	42 unit	1.426.000.000	0 unit	-	126 unit	3.847.900.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	47 jenis	52 jenis	195.845.500	52 jenis	209.175.000	52 jenis	223.400.000	52 jenis	238.600.000	52 jenis	46.650.000	52 jenis	913.670.500		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah halaman kantor/gedung kantor yang ditata	1 kantor	2 kantor	297.000.000	2 kantor	320.400.000	2 kantor	342.190.000	2 kantor	365.460.000	2 kantor	290.300.000	10 kantor	1.615.350.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.011.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana Gedung kantor yang dipelihara	7 kantor	2 kantor	111.683.500	2 kantor	119.278.000	2 kantor	127.389.000	2 kantor	136.050.000	2 kantor	145.300.000	10 kantor	639.700.500		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	266 unit	10 unit	96.536.500	10 unit	103.100.000	10 unit	110.110.000	10 unit	117.600.000	10 unit	125.600.000	10 unit	552.946.500		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	6 jenis	70.000.000	6 jenis	74.760.000	6 jenis	79.845.000	6 jenis	85.275.000	6 jenis	91.075.000	6 jenis	400.955.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.02.016.	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Jumlah Kantor dan tanah yang disewa (unit)	3 unit	3 unit	21.000.000	3 unit	22.500.000	3 unit	24.000.000	3 unit	25.500.000	3 unit	27.000.000	3 unit	120.000.000		Sekretariat Dinas	UPTD PKP Wil. Sukasari
		0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	0 unit	2 unit	350.000.000	2 unit	373.800.000	2 unit	399.225.000	2 unit	426.375.000	2 unit	276.631.000	10 unit	1.826.031.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-		-		545.100.000		-		-		545.100.000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen				
		0.00.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	0 stel	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	165.900.000	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	165.900.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.03.002.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0 stel	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	142.200.000	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	142.200.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0 stel	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	71.100.000	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	71.100.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.03.004.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0 stel	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	165.900.000	0 stel	-	0 stel	-	474 stel	165.900.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.04.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				-		-		15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Cakupan fasilitas pindah/purna tugas PNS	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen				
		0.00.00.04.001.	Pemindahan Pindah Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas	0 orang	0 orang	-	0 orang	-	1 orang	5.000.000	1 orang	5.000.000	1 orang	5.000.000	1 orang	15.000.000		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0.00.00.04.002.	Pemberian Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas	Jumlah Tanda Mata untuk Pegawai Purna Tugas	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	30.000.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				200.306.000		209.000.000		309.000.000		309.000.000		309.000.000		1.336.306.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-		Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		0.00.00.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim	16 orang	7 orang	197.306.000	7 orang	200.000.000	51 Orang	997.306.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang							
		0.00.00.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah acara peningkatan kapasitas aparatur	0 kali	4 kali	3.000.000	12 kali	9.000.000	13 kali	109.000.000	13 kali	109.000.000	13 kali	109.000.000	55 kali	339.000.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000		1.831.530.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.06.		Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akutansi Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Kinerja yang dihasilkan	7 dokumen	7 dokume n	150.000.000	7 dokume n	165.000.000	7 dokume n	181.500.000	7 dokume n	199.650.000	7 dokume n	219.615.000	7 dokum en	915.765.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokume n	150.000.000	12 dokume n	165.000.000	12 dokume n	181.500.000	12 dokume n	199.650.000	12 dokume n	219.615.000	12 dokum en	915.765.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				151.372.000		161.675.000		172.675.000		184.425.000		196.965.900		867.112.900	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja, PRA RKA/PRA RKA-P, RKA/RKA-P, DPA/DPPA	13 dokumen	6 dokume n	151.372.000	6 dokume n	161.675.000	6 dokume n	172.675.000	6 dokume n	184.425.000	6 dokume n	196.965.900	6 dokum en	867.112.900	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD				15.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		247.050.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-			
		0.00.00.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen data Kepegawaian yang dikelola	3 dokumen	3 dokume n	15.000.000	3 dokume n	50.000.000	3 dokume n	55.000.000	3 dokume n	60.500.000	3 dokume n	66.550.000	3 dokum en	247.050.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			URUSAN PANGAN				7.645.000.000		1.732.349.500		1.823.713.650		1.919.239.750		2.019.078.600		15.139.381.500					
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian	6,79 Persen	6,90 Persen			7,02 Persen		7,15 Persen		7,29 Persen		7,44 Persen			7,44 Persen		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumedang	
	Menjamin ketahanan pangan daerah			Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85 Persen	87,30 Persen			88,50 Persen		89,60 Persen		90,80 Persen		92,50 Persen			92,50 Persen				
		1.02.03.15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan				7.645.000.000		1.732.349.500		1.823.713.650		1.919.239.750		2.019.078.600		15.139.381.500			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	-	-	-		
				Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	91,50 Persen	92,50 Persen	-	93,50 Persen	-	94,50 Persen	-	95,00 Persen	-	95,50 Persen	-	95,50 Persen	-	-	-	-		
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	-	-	-		
		1.02.03.15.001.	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Jumlah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang dikembangkan	200 poktan	22 poktan	5.698.500.000	12 poktan	782.749.500	12 poktan	850.000.000	12 poktan	900.000.000	12 poktan	950.000.000	270 poktan	9.181.249.500			Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Sumedang	
		1.02.03.15.002.	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase penanganan penduduk rawan pangan yang diintervensi	100 persen	100 persen	561.250.000	100 persen	299.000.000	100 persen	309.451.850	100 persen	320.724.250	100 persen	337.298.600	100 persen	1.827.724.700			Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Sumedang	
		1.02.03.15.003.	Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah KWT yang mengembangkan pengankaragaman konsumsi pangan	15 KWT	105 KWT	895.000.000	11 KWT	250.600.000	12 KWT	264.261.800	12 KWT	298.515.500	14 KWT	331.780.000	169.000 KWT	2.040.157.300			Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Sumedang	
		1.02.03.15.004.	Peningkatan dan Pengembangan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Jumlah pengujian sampel pangan	2 kali	2 kali	240.250.000	2 kali	150.000.000	10 kali	840.250.000			Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Sumedang							
		1.02.03.15.007.	Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka mendukung Program P2WKSS	Jumlah model pemanfaatan pekarangan pangan	1 KWT	1 KWT	50.000.000	1 KWT	50.000.000	1 KWT	50.000.000	1 KWT	50.000.000	1 KWT	50.000.000	5 KWT	250.000.000			Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Sumedang	
		1.02.03.15.013.	Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu dan Partisipasi pada Hari Pangan Sedunia	Jumlah KWT pada pelaksanaan kegiatan Lomba Cipta Menu Non Beras Tk. Kabupaten	0 KWT	26 KWT	200.000.000	26 KWT	200.000.000	26 KWT	200.000.000	26 KWT	200.000.000	26 KWT	200.000.000	130 poktan	1.000.000.000			Bidang Ketahanan Pangan	Kab. Sumedang	
				Jumlah kelompok tani yang difasilitasi keikutsertaannya pada Hari Pangan Sedunia Tk. Nasional	0 poktan	1 poktan		1 poktan		1 poktan		1 poktan		1 poktan	5 poktan							
			URUSAN PERTANIAN				46.006.266.000		29.497.032.000		31.052.705.500		32.679.262.100		34.379.301.700		173.614.567.300					
Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian	6,79 Persen	6,90 Persen			7,02 Persen		7,15 Persen		7,29 Persen		7,44 Persen			7,44 Persen		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumedang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian :																
				a. Tanaman Pangan	10,04 Persen	10,14 Persen		10,24 Persen		10,34 Persen		10,45 Persen		10,55 Persen		10,55 Persen				
				b. Tanaman Hortikultura	3,2 Persen	4,00 Persen		4,70 Persen		5,40 Persen		6,10 Persen		6,80 Persen		6,80 Persen				
				c. Perkebunan	4,12 Persen	4,20 Persen		4,80 Persen		5,50 Persen		6,20 Persen		6,90 Persen		6,90 Persen				
		2.02.03.15.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				2.650.000.000		2.790.715.000		2.937.897.400		3.091.784.400		3.252.700.000		14.723.096.800	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Jumlah Produksi Tanaman Pangan	740.732 Ton	815.842 Ton	-	899.384 Ton		992.381 Ton		1.096.085 Ton		1.211.722 Ton		1.211.722 Ton		-		
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	151.333 Ton	157.386 Ton	-	164.783 Ton		173.682 Ton		184.276 Ton		196.807 Ton		196.807 Ton		-		
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	6.462 Ton	6.733 Ton	-	7.057 Ton		7.445 Ton		7.906 Ton		8.452 Ton		8.452 Ton		-		
		2.02.03.15.001.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Serealia	Luas tanam komoditas serealia	75.757 ha	378,79 ha	100.000.000	382,57 ha	150.000.000	386,40 ha	150.000.000	390,26 ha	150.000.000	396,12 ha	150.000.000	77.691,14 ha	700.000.000	Bidang Tanaman Pangan	Kab. Sumedang	
		2.02.03.15.002.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija	Luas tanam komoditas palawija	15.081 ha	75,41 ha	100.000.000	76,16 ha	150.000.000	76,92 ha	150.000.000	77,69 ha	150.000.000	78,86 ha	150.000.000	15.466,03 ha	700.000.000	Bidang Tanaman Pangan	Kab. Sumedang	
		2.02.03.15.003.	Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Padi dan Palawija	Luas tanam komoditas padi dan palawija di UPTD Balai Benih Padi Palawija Ujungjaya	5 ha	5 ha	75.000.000	5 ha	100.000.000	25 ha	475.000.000	UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Ujungjaya	Kab. Sumedang							
		2.02.03.15.004.	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Persentase Luas Areal Tanam Komoditas Tanaman Pangan yang aman dari serangan OPT dan DPI	95 persen	95 persen	70.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	370.000.000	Bidang Tanaman Pangan	Kab. Sumedang							
		2.02.03.15.007.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat	Luas Tanam Komoditas Sayuran	3.972 ha	4031,58 ha	100.000.000	4.092,05 ha	150.000.000	4.153,43 ha	150.000.000	4.215,74 ha	150.000.000	4.300,05 ha	150.000.000	24.764,85 ha	700.000.000	Bidang Hortikultura	Kab. Sumedang	
				Luas Tanam Komoditas Tanaman Obat	106 ha	107,59 ha		109,20 ha		110,84 ha		112,50 ha		114,75 ha		660,89 ha				
		2.02.03.15.008.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias	Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan	1.426.827 pohon	14.268 pohon	100.000.000	14.482 pohon	150.000.000	14.700 pohon	150.000.000	14.920 pohon	150.000.000	15.218 pohon	150.000.000	1.500.416 pohon	700.000.000	Bidang Hortikultura	Kab. Sumedang	
				Jumlah Populasi Tanaman Hias	265.318 tangkai	10.613 tangkai		13.568 tangkai		15.601 tangkai		18.575 tangkai		21.969 tangkai		345.644 tangkai				
		2.02.03.15.009.	Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Benih Komoditas Hortikultura yang tersedia	1000 pohon	1.040 pohon	75.000.000	1.089 pohon	75.000.000	1.148 pohon	75.000.000	1.218 pohon	75.000.000	1.300 pohon	75.000.000	1.300 pohon	375.000.000	UPTD Balai Benih Hortikultura dan Perbibitan Perkebunan Rancakalong	Kab. Sumedang	
				Jumlah Benih/Bibit Komoditas Perkebunan yang tersedia	500 pohon	521 pohon		546 pohon		576 pohon		612 pohon		654 pohon		654 pohon				
		2.02.03.15.010.	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Persentase Luas Areal Tanam Komoditas Hortikultura yang aman dari serangan OPT dan DPI	95 persen	95 persen	75.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	375.000.000	Bidang Hortikultura	Kab. Sumedang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.02.03.15.013.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyejar	Luas tanam komoditas tanaman tahunan dan penyejar yang dipelihara (intensifikasi)	11.291 ha	11.351 ha	100.000.000	11.382 ha	150.000.000	11.393 ha	150.000.000	11.397 ha	150.000.000	11.402 ha	150.000.000	11.402 ha	700.000.000	Bidang Perkebunan	Kab. Sumedang
				Luas tanam komoditas tanaman tahunan dan penyejar yang dikembangkan (ekstensifikasi)	2.100 ha	2.108 ha		2.118 ha		2.131 ha		2.146 ha		2.164 ha		2.164 ha			
		2.02.03.15.014.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah	Luas tanam komoditas tanaman semusim dan rempah yang dipelihara (intensifikasi)	652 ha	675 ha	100.000.000	659 ha	150.000.000	662 ha	150.000.000	665 ha	150.000.000	668 ha	150.000.000	668 ha	700.000.000	Bidang Perkebunan	Kab. Sumedang
				Luas tanam komoditas tanaman semusim dan rempah yang dikembangkan (ekstensifikasi)	2.528 ha	2.532 ha		2.543 ha		2.551 ha		2.559 ha		2.565 ha		2.565 ha			
		2.02.03.15.015.	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Perkebunan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Persentase Luas Areal Tanaman Perkebunan yang aman dari Serangan OPT dan DPI	95 persen	95 persen	73.675.000	95 persen	75.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	75.000.000	95 persen	373.675.000	Bidang Perkebunan	Kab. Sumedang
		2.02.03.15.018.	Peningkatan Kapasitas Petani	Jumlah Petani Terlatih	774 orang	29 orang	75.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	923 orang	475.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.15.019.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani	Jumlah kelompok tani berprestasi	5 poktan	5 poktan	75.000.000	5 poktan	100.000.000	5 poktan	100.000.000	5 poktan	100.000.000	5 poktan	100.000.000	25 poktan	475.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.15.020.	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian	Jumlah Dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian	2 jenis dokumen	8 jenis dokumen	531.325.000	0 jenis dokumen	-	0 jenis dokumen	-	0 jenis dokumen	-	0 jenis dokumen	-	8 jenis dokumen	531.325.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		2.02.03.15.028.	Pemberdayaan Kapasitas Buruh Tani	Jumlah buruh tani terlatih	0 orang	500 orang	1.000.000.000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	500 orang	1.000.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.15.029.	Pemberdayaan Buruh Tani	Jumlah buruh tani terlatih	0 orang	0 orang	-	2.193 orang	640.715.000	2.384 orang	737.897.400	2.151 orang	841.784.400	1.440 orang	952.700.000	8.168 orang	3.173.096.800	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.15.030.	Penguatan Kerangka Kelembagaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan	Jumlah kelembagaan tani di sekitar Daerah Irigasi (DI) berbasis lahan LP2B yang mendapatkan bantuan pemerintah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu/ IPDMIP APBN)	0 poktan	0 poktan	-	6 poktan	200.000.000	6 poktan	250.000.000	6 poktan	300.000.000	6 poktan	350.000.000	500 poktan	1.100.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.15.040.	Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Pertanian	Jumlah Laporan Data Komoditas dan Non-Komoditas Pertanian	0 dokumen	0 dokumen	-	6 dokumen	450.000.000	6 dokumen	450.000.000	6 dokumen	450.000.000	6 dokumen	450.000.000	6 dokumen	1.800.000.000	Sekretariat Dinas	Kab. Sumedang
		2.02.03.16.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					38.592.724.000	23.659.127.900		24.906.910.250		26.211.550.000		27.575.058.300		140.945.370.450	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Jumlah Penambahan Alat Mesin Pertanian	5.752 unit	6.052 unit	-	6.352 unit		-	6.652 unit	-	6.952 unit	-	7.252 unit	-	7.252 unit		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	1.85 Persen	1.95 Persen	-	2.05 Persen	-	2.15 Persen	-	2.25 Persen	-	2.35 Persen	-	2.35 Persen	-			
				Jumlah Penambahan Panjang Jalan Pertanian	62 Km	77 Km	-	92 Km	-	107 Km	-	122 Km	-	137 Km	-	137 Km	-			
		2.02.03.16.003.	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Panjang saluran irigasi yang dibangun/diperbaiki	65.210 meter	76.560 meter		11.350.000.000	87.781 meter	11.220.875.000	99.520 meter	11.739.252.500	112.313 meter	12.792.721.000	125.945 meter	13.632.475.000	125.945 meter	60.735.323.500	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.16.005.	Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air	Jumlah sarana dan sarana sumber air pertanian yang dibangun/diperbaiki	120 unit	218 unit		14.707.724.000	238 unit	3.000.000.000	258 unit	3.000.000.000	278 unit	3.000.000.000	298 unit	3.000.000.000	298 unit	26.707.724.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.16.010.	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	Panjang Jalan Pertanian yang dibangun/diperbaiki	53.710 km	53.725 km		11.735.000.000	53.736 km	8.524.845.000	53.747 km	8.974.530.000	53.759 km	9.444.620.000	53.771 km	9.935.930.000	53.771 km	48.614.925.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.16.011.	Perlindungan Lahan Pertanian	Jumlah dokumen untuk kelengkapan penyusunan Perda dan Perbup Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	0 dokumen	1 dokumen		250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	5 dokumen	1.500.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.16.014.	Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Jumlah hasil kaji terap teknologi pertanian yang dikembangkan oleh UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS)	0 teknologi	1 teknologi		100.000.000	1 teknologi	100.000.000	5 teknologi	500.000.000	UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang	Kab. Sumedang						
		2.02.03.16.020.	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Jumlah alat mesin pertanian pra panen yang disalurkan	5.752 unit	6.025 unit		400.000.000	6.352 unit	512.859.000	6.652 unit	542.577.750	6.952 unit	573.659.000	7.252 unit	606.103.300	7.252 unit	2.635.199.050	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
				Jumlah kelompok tani yang menerima alat mesin pertanian pra panen	1.009 poktan	1.059 poktan			1.149 poktan		1.274 poktan		1.429 poktan		1.614 poktan		1.614 poktan			
		2.02.03.16.023.	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Jumlah dokumen Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan RDKK	26 dokumen	0 dokumen		50.000.000	26 dokumen	50.548.900	26 dokumen	50.550.000	26 dokumen	50.550.000	26 dokumen	50.550.000	104 dokumen	252.198.900	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.17.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan				1.300.000.000		1.369.030.000		1.441.232.650		1.516.724.500		1.595.624.500		7.222.611.650	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	105 poktan	120 poktan			138 poktan		157 poktan		179 poktan		206 poktan		206 poktan			
				Jumlah Dokumen Kerjasama Kemitraan Usaha Tani	48 dokumen	53 dokumen			58 dokumen		63 dokumen		68 dokumen		73 dokumen		73 dokumen			
		2.02.03.17.004.	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Tembakau	Jumlah sarana prasarana pendukung publikasi dan informasi agribisnis tembakau di UPTD Agribisnis Tembakau	1 unit	2 unit		150.000.000	3 unit	150.000.000	4 unit	150.000.000	5 unit	150.000.000	6 unit	150.000.000	6 unit	750.000.000	UPTD Agribisnis Tembakau	Kab. Sumedang
				Jumlah kelompok tani yang menjalin kerjasama kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil tembakau	1 poktan	2 poktan			3 poktan		4 poktan		5 poktan		6 poktan		6 poktan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.02.03.17.006.	Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kopi	Jumlah kelompok tani yang diintervensi prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran produk hasil kopi	10 poktan	19 poktan	250.000.000	0 poktan	-	19 poktan	250.000.000	Bidang Perkebunan	Kab. Sumedang						
				Jumlah kelompok tani yang menjalin kerjasama kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil kopi	1 poktan	2 poktan		0 poktan		0 poktan		0 poktan		0 poktan		2 poktan			
		2.02.03.17.008.	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Tanaman Pangan	Jumlah kelompok tani yang diintervensi prasarana dan sarana panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk hasil tanaman pangan	15 poktan	18 poktan	200.000.000	24 poktan	300.000.000	30 poktan	325.000.000	37 poktan	350.000.000	42 poktan	375.000.000	42 poktan	1.550.000.000	Bidang Tanaman Pangan	Kab. Sumedang
				Jumlah kelompok tani yang menjalin kerjasama kemitraan usaha panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk hasil tanaman pangan	4 poktan	5 poktan		6 poktan		7 poktan		8 poktan		9 poktan		9 poktan			
		2.02.03.17.009.	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura	Jumlah kelompok tani yang diintervensi prasarana dan sarana panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk hasil hortikultura	25 poktan	28 poktan	200.000.000	34 poktan	300.000.000	40 poktan	325.000.000	47 poktan	350.000.000	56 poktan	375.000.000	56 poktan	1.550.000.000	Bidang Hortikultura	Kab. Sumedang
				Jumlah kelompok tani yang menjalin kerjasama kemitraan usaha panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk hasil hortikultura	8 poktan	9 poktan		10 poktan		11 poktan		12 poktan		13 poktan		13 poktan			
		2.02.03.17.010.	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang diintervensi prasarana dan sarana panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan	55 poktan	59 poktan	200.000.000	65 poktan	300.000.000	72 poktan	325.000.000	80 poktan	350.000.000	89 poktan	375.000.000	89 poktan	1.550.000.000	Bidang Perkebunan	Kab. Sumedang
				Jumlah kelompok tani yang menjalin kerjasama kemitraan usaha panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan	34 poktan	35 poktan		37 poktan		39 poktan		41 poktan		43 poktan		43 poktan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.02.03.17.014.	Penyelenggaraan Promosi Produk Hasil Pertanian	Jumlah peserta pada pelaksanaan kegiatan promosi produk hasil pertanian	0 orang	100 orang	300.000.000	100 orang	319.030.000	100 orang	316.232.650	100 orang	316.724.500	100 orang	320.624.500	500 orang	1.572.611.650	Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Bidang Perkebunan	
		2.02.03.18.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				3.463.542.000		1.678.159.100		1.766.665.200		1.859.203.200		1.955.918.900		10.723.488.400	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	3 teknologi/p enyuluh	6 teknologi/p enyuluh	-	9 teknologi/p enyuluh	-	12 teknologi/p enyuluh	-	15 teknologi/p enyuluh	-	18 teknologi/p enyuluh	-	18 teknologi/p enyuluh	-		
				Penumbuhan Kelompok Tani Baru	2.835 poktan	275 poktan	-	550 poktan	-	825 poktan	-	1.100 poktan	-	1.375 poktan	-	1.375 poktan	-		
				Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan:	2.242 poktan	2.242 poktan	-	2.242 poktan	-	2.242 poktan	-	2.242 poktan	-	2.242 poktan	-	2.242 poktan	-		
				- Kelas Pemula (skor 0-250)	767 poktan	762 poktan	-	757 poktan	-	752 poktan	-	746 poktan	-	739 poktan	-	739 poktan	-		
				- Kelas Lanjut (skor251-500)	1.405 poktan	1.406 poktan	-	1.407 poktan	-	1.408 poktan	-	1.410 poktan	-	1.413 poktan	-	1.413 poktan	-		
				- Kelas Madya (skor 501-750)	68 poktan	71 poktan	-	74 poktan	-	77 poktan	-	80 poktan	-	83 poktan	-	83 poktan	-		
				- Kelas Utama (skor 751-1000)	2 poktan	3 poktan	-	4 poktan	-	5 poktan	-	6 poktan	-	7 poktan	-	7 poktan	-		
		2.02.03.18.005.	Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang difasilitasi BOP	182 orang	182 orang	1.240.000.000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	182 orang	1.240.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.18.009.	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang terfasilitasi BOP dan peningkatan kapasitas dalam pendampingan peningkatan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	182 orang	182 orang	-	182 orang	250.000.000	182 orang	350.000.000	182 orang	400.000.000	182 orang	450.000.000	182 orang	1.450.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.18.010.	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian melalui penerapan adaptasi teknologi spesifik lokalita, pemanfaatan smart mobile berdasarkan program penyuluhan dan pengawasan/bimbingan teknis di lokasi stunting	0 unit	0 unit	-	30 unit	350.000.000	40 unit	450.000.000	50 unit	500.000.000	50 unit	500.000.000	170 unit	1.800.000.000	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang
		2.02.03.18.011.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitas usahanya (1. Kelompok Tani; 2. Gapoktan; 3. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); 4. POSLUHDES; 5. BPP; 6. Daerah Irigasi Kegiatan IPDMIP)	0 unit	100 unit	2.173.542.000	50 unit	828.159.100	50 unit	866.665.200	50 unit	859.203.200	30 unit	655.918.900	280 unit	5.383.488.400	Bidang Sumberdaya	Kab. Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.02.03.18.012.	Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian dan Partisipasi Pada Pekan Nasional Petani Nelayan	Jumlah peserta pada pelaksanaan Kegiatan Hari Krida Pertanian Tk. Kabupaten Tahun 2020; 2023	0 orang	10 orang	50.000.000	100 orang	250.000.000	0 orang	100.000.000	0 orang	100.000.000	200 orang	350.000.000	310 orang	850.000.000	Bidang Sumberdaya	
				Jumlah peserta yang difasilitasi keikutsertaannya pada Hari Krida Pertanian Tk. Provinsi Tahun 2019;2021;2022	10 orang	10 orang		0 orang		50 orang		50 orang		0 orang		120 orang			
				Jumlah petani Kabupaten Sumedang yang difasilitasi keikutsertaannya pada Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2020; 2023	0 orang	0 orang		10 orang		0 orang		0 orang		20 orang		30 orang			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PANGAN									
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan									
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	91,50	92,50	93,50	94,50	95,00	95,50	95,50
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan pangan olahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PERTANIAN									
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan									
1	Jumlah produksi Tanaman pangan	Ton	740.732	815.842	899.384	992.381	1.096.085	1.211.722	1.211.722
2	Jumlah produksi Tanaman Hortikultura	Ton	151.333	157.386	164.783	173.682	184.276	196.807	196.807
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6.462	6.733	7.057	7.445	7.906	8.452	8.452
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan									
1	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	Unit	5.752	6.052	6.352	6.652	6.952	7.252	7.252
2	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Persen	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	2,35
3	Jumlah penambahan panjang jalan	Km	62	77	92	107	122	137	137

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pertanian								
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan									
1	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	105	120	138	157	179	206	206
2	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	48	53	58	63	68	73	73
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan									
1	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	teknologi/ penyuluh pertanian	3	6	9	12	15	18	18
2	Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	2.835	275	550	825	1.100	1.375	1.375
3	Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
	-Kelas Pemula (skor 0-250)	Kelompok	767	762	757	752	746	739	739
	-Kelas Lanjut (skor 251-500)	Kelompok	1.405	1.406	1.407	1.408	1.410	1.413	1.413
	-Kelas Madya (skor 501-750)	Kelompok	68	71	74	77	80	83	83
	-Kelas Utama (skor 751-1000)	Kelompok	2	3	4	5	6	7	7

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR